

**ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN FASILITAS
KITE (KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN
EKSPOR) TERHADAP VOLUME IMPOR
BAHAN BAKU INDUSTRI GARMENT DAN
TEKSTIL DI JAWA TENGAH**



TESIS

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan

Ratu Amalia SY
C4B002335

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

**Agustus
2007**

Tesis

**ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN FASILITAS
KITE (KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN
EKSPOR) TERHADAP VOLUME IMPOR
BAHAN BAKU INDUSTRI GARMENT DAN
TEKSTIL DI JAWA TENGAH**

Oleh
Ratu Amalia SY
C4B002335

telah disetujui
oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Edy Yusuf AG, MSc
Tanggal :

Akhmad Syakir Kurnia, SE, MSi
Tanggal :

TESIS
ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN FASILITAS KITE
(KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR)
TERHADAP VOLUME IMPOR BAHAN BAKU
INDUSTRI GARMENT DAN TEKSTIL DI JAWA TENGAH

disusun Oleh

Ratu Amalia SY
C4B002335

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Penguji

Dr. Edy Yusuf AG, MSc

Drs. Y. Bagio Mudakir, MT

Pembimbing Pendamping

Akhmad Syakir Kurnia, SE, Msi

Telah dinyatakan lulus Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Tanggal 2007
Ketua Program Studi

Dr. Dwisetia Poerwono, MSc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2007

Ratu Amalia SY

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah SWT
- Selalu berdoa dan bekerja keras

Persembahan:

- Untuk Ibunda Tersayang
- Untuk Suamiku Terkasih
- Untuk Anakku Tercinta Linar

ABSTRACT

For developing country like Indonesia, there are a lot of positive point in doing international commerce, among others by improvement of making efficient use of domestic resources which is owned by agriculture commodity and rae material, which manifested in export and import form. One of government efforts to motivate the international commerce increase, is giving the Import Ease to Export Facitity (KITE) for enterprises who doing raw material import which used to produce commodity for export purpose by means of DJBC institution.

The aim of this research is to analyze the effect of raw material import price (whether domestic price or abroad price), the effect of export volume and the effect of giving the Import Ease Facility to raw material import volume for garment and textile industry in Central java, with the panel data which formed by combining the time series data (2004 until 2006) and cross section data (16 garment dan textile enterprises). The analyses model used is LSDV (Least Squares Dummy Variable) regression model.

The simultaneous result showed that, at the same time, all of the independent variables (domestic price, abroad price, export volume and facility value/KITE facility with dummy variable in 2005 and 2006) give the significant influences to raw material import value for garment and textile industry in Central java. But partially (individually), the material import price (domestic price and abroad price) give insignificant influence and negative coefficient value to raw material impor volume, so if there was a price increase would cause import volume decrease. Whereas, if the export volume and the KITE facility give the significant and positive influence, it means that, if there wasan increase in export volume or KITE facility value, would cause raw material import volume increase.

The conclusion of this research showed that the KITE facility gift apparently give the positive influence to raw material import volume for garment and textile industry in Central Java. The increase presence in the amount of 1% would motivated the increase of import volume in the amount of 0,6192%, while the export volume increase would motivated the increase of import volume in the amount of 0,4315%.

The KITE facility gift hoped, that it could motivate the increase of raw material import activity for garment and textile industry, so the purpose of the facility gift would achieve and it would motivate the increase of export. Finally, the supervision wasvery important, considering increasingly the infraction that happened in customs office sector like smuggling and fictive export, which cause inflicted a loss upon the country.

Keyword: international commerce, export volume, import volume, KITE facility, regression (LSDV), garment and textile industry.

ABSTRAKSI

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, melakukan perdagangan internasional membawa keuntungan positif antara lain meningkatnya pendayagunaan sumber daya domestik yang dimiliki terutama untuk komoditi pertanian dan bahan mentah yang dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan ekspor impor. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan perdagangan internasional tersebut, pemerintah melalui institusi DJBC memberikan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Eskpor (KITE) kepada perusahaan yang melakukan impor bahan baku yang digunakan memproduksi barang untuk tujuan ekspor.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak/pengaruh harga bahan baku impor (harga dalam negeri dan harga luar negeri), pengaruh volume ekspor dan pengaruh pemberian fasilitas kemudahan impor terhadap volume impor bahan baku untuk industri garment dan tekstil di Jawa Tengah, dengan data panel yang merupakan gabungan data time series (tahun 2004 s/d 2006) dan data cross section (16 perusahaan garment dan tekstil). Model analisis yang digunakan adalah model regresi LSDV (Least Squares Dummy Variable).

Hasil estimasi secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel bebas (harga dalam negeri, harga luar negeri, volume ekspor dan nilai fasilitas serta variabel dummy tahun 2005 dan 2006) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume impor bahan baku untuk industri garment dan tekstil di Jawa Tengah. Namun secara parsial (individual), harga bahan impor (harga dalam negeri dan harga luar negeri) memberikan pengaruh yang tidak signifikan dan nilai koefisien yang negatif terhadap volume impor bahan baku sehingga apabila terjadi kenaikan harga mengakibatkan penurunan volume impor. Sedangkan volume ekspor dan fasilitas KITE memberikan pengaruh yang signifikan dan positif, berarti apabila terjadi kenaikan volume ekspor atau kenaikan nilai fasilitas akan mengakibatkan kenaikan pada volume impor bahan baku.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian fasilitas KITE ternyata memberikan pengaruh yang positif terhadap volume impor bahan baku untuk industri garment dan tekstil di Jawa Tengah. Adanya kenaikan nilai fasilitas sebesar 1% akan mendorong kenaikan volume impor sebesar 0,6192%. Sedangkan untuk kenaikan volume ekspor sebesar 1% akan mendorong kenaikan volume impor sebesar 0,4315%.

Pemberian Fasilitas KITE diharapkan mampu mendorong peningkatan kegiatan impor bahan baku industri garment dan tekstil sehingga tujuan diberikan fasilitas ini dapat tercapai yaitu mendorong peningkatan ekspor. Pengawasan sangat penting dalam hal ini mengingat semakin maraknya pelanggaran yang terjadi di bidang kepabeanan seperti tindakan penyelundupan dan ekspor fiktif, yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

Kata Kunci: Perdagangan internasional, volume ekspor, volume impor, fasilitas KITE, Regresi (LSDV), industri garment dan tekstil

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ratu Amalia SY

NIM : C4B002335

Tempat/ tanggal lahir : Pemalang, 11-07-1963

Agama : Islam

Alamat : Jl. Sinar Surya VI-941.D Perum Sinar Waluyo
Semarang 50273

Nama Ayah : Tb. Noerhendy Nitiwidjaja (alm)

Nama Ibu : Kitty Sulistya

Nama Suami : Ir. Ari Nuryanto

Nama Anak : Kartika Ratu Yulinar

Pendidikan :

1. SD Negeri Jomblang Barat Semarang, lulus tahun 1975
2. SMP Negeri 2 Semarang, lulus tahun 1979
3. SMA Negeri 1 Semarang, lulus tahun 1982
4. Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,
Universitas Diponegoro Semarang, lulus tahun 1989

Pekerjaan : Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah & Daerah
Istimewa Yogyakarta

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRACT | vi |
| ABSTRAKSI | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 10 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian | 16 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS | |
| 2.1. Tinjauan Pustaka | 18 |
| 2.1.1. Pentingnya Perdagangan Internasional | 18 |
| 2.1.2. Term Of Trade | 22 |
| 2.1.3. Teori Keunggulan Komparatif | 27 |
| 2.1.4. Teori H – O | 29 |
| 2.1.5. Analisis Keseimbangan Parsial | 32 |
| 2.1.6. Dampak Keseimbangan Parsial akibat Tarif | 36 |
| 2.1.7. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor | 39 |
| 2.1.8. Penelitian Terdahulu | 40 |
| 2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis | 41 |
| 2.3. Hipotesis | 42 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Definisi Operasional | 43 |
| 3.2. Jenis dan Sumber Data | 44 |
| 3.3. Populasi | 45 |
| 3.4. Metode Pengumpulan Data | 45 |
| | Halaman |
| 3.5. Teknik Analisis | 46 |

| | | |
|--------|--|----|
| 3.5.1. | Analisis Regresi | 46 |
| 3.5.2. | Uji Ekonometri | 51 |
| IV. | GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN | |
| 4.1. | Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) | 56 |
| 4.1.1. | Dasar Hukum | 56 |
| 4.1.2. | Peraturan Pelaksanaan | 57 |
| 4.1.3. | Jenis Fasilitas | 58 |
| 4.1.4. | Persyaratan Pokok Fasilitas | 59 |
| 4.1.5. | Prosedur Pemberian Fasilitas Pembebasan | 62 |
| 4.1.6. | Prosedur Pengeluaran Barang | 63 |
| 4.1.7. | Kewajiban Perusahaan Fasilitas KITE | 64 |
| 4.2. | Fasilitas KITE di Jawa Tengah | 66 |
| V. | HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 5.1. | Hasil Regresi | 72 |
| 5.1.1. | Uji-F | 73 |
| 5.1.2. | Uji-t | 74 |
| 5.1.3. | Pengujian Hipotesis | 74 |
| 5.1.4. | Koefisien Determinasi | 76 |
| 5.2. | Pengujian Asumsi Klasik | 77 |
| 5.2.1. | Uji Multikolinearitas | 77 |
| 5.2.2. | Uji Heteroskedastisitas | 78 |
| 5.2.3. | Uji Autokorelasi | 79 |
| 5.3. | Pembahasan | 80 |
| 5.3.1. | Model Regresi | 80 |
| 5.3.2. | Fasilitas KITE | 82 |
| VI. | KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 6.1. | Kesimpulan | 85 |
| 6.2. | Saran | 86 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 88 |
| | LAMPIRAN | |
| | BIODATA | |

DAFTAR TABEL

Halaman

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Komoditas Tahun 2003-2005 (dalam Juta USD) | 8 |
| Tabel 1.2 | Data Impor Jawa Tengah Menurut Komoditas Tahun 2003-2005 (dalam Juta USD) | 9 |
| Tabel 1.3 | Nilai Fasilitas Pembebasan KITE tahun 2004 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (dalam Rp) | 12 |
| Tabel 1.4 | Nilai Fasilitas Pembebasan KITE tahun 2004 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (dalam Rp) | 13 |
| Tabel 1.5 | Nilai Fasilitas Pembebasan KITE tahun 2004 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (dalam Rp) | 14 |
| Tabel 1.6 | Fasilitas Pembebasan KITE tahun 2004-2006 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta | 15 |
| Tabel 2.1 | Keunggulan Komparatif | 28 |
| Tabel 5.1 | Rangkuman Hasil Estimasi | 73 |
| Tabel 5.2 | Hasil Pengujian Multikolinearitas | 78 |
| Tabel 5.3 | Hasil Pengujian Heteroskedastisitas | 79 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Teori Hecksher-Ohlin | 30 |
| Gambar 2.2 | Harga Komoditi Relatif Ekuilibrium setelah Perdagangan Ditinjau dari Analisis Keseimbangan Parsial . | 33 |
| Gambar 2.3 | Dampak Keseimbangan Parsial Akibat Tarif | 36 |
| Gambar 2.4 | Kerangka Pemikiran Teoritis | 41 |

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----------|----|---|
| Lampiran | 1. | Data Ekspor Impor Industri Garment dan Tekstil di Jawa Tengah Tahun 2004-2006 |
| Lampiran | 2. | Perusahaan Pengguna Fasilitas KITE Tahun 2006 |
| Lampiran | 3. | Output Regresi |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan setiap negara bukan hanya pembangunan yang bersifat fisik. Pembangunan diupayakan untuk dapat memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam suatu negara seperti masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan yang banyak dialami oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia.

Pada mulanya pembangunan negara sedang berkembang (NSB) diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi (Mudrajad.2000). Namun kemudian keberadaan pembangunan sangat diperlukan, terutama di negara kita sebagai salah satu negara sedang berkembang untuk dapat mewujudkan cita-cita nasional menuju masyarakat yang sejahtera, damai dan berkeadilan, setelah sekian lama merasakan akibat dari krisis ekonomi yang melanda negeri ini pada tahun 1997.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu diharapkan untuk dapat meningkatkan/ memperbaiki taraf hidup penduduknya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul sesuai/pas dengan kondisi daerah tersebut dengan menggali seluruh potensi yang ada.

Salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan perkapita adalah dengan melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan antar daerah

(interregional) maupun perdagangan antar negara (internasional). Dalam perdagangan internasional antara negara maju dan negara sedang berkembang, awalnya terjadi kesenjangan karena produk yang dipertukarkan oleh negara sedang berkembang merupakan produk primer dan bahan mentah yang diperdagangkan untuk mendapatkan produk manufaktur dari negara maju. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pola perdagangan internasional tidak lagi demikian, karena negara berkembang mulai bangkit dan melakukan diversifikasi produknya seperti apa yang dimiliki negara maju. Sehingga dengan adanya perdagangan internasional akan menguntungkan kedua belah pihak baik untuk negara sedang berkembang maupun negara maju. Perdagangan internasional dikatakan sebagai mesin pertumbuhan apabila perdagangan tersebut mampu menumbuhkan daerah-daerah baru yang mengalami pertumbuhan dan pembangunan yang pesat karena keterlibatan mereka dalam kegiatan ekspor impor. Salah satu penyebab mengapa perdagangan internasional dilakukan oleh negara berkembang karena perdagangan tersebut diharapkan mampu menunjang proses pembangunan ekonomi negara sedang berkembang tersebut. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang.

Bagi negara sedang berkembang, ada keuntungan positif yang dapat diambil dengan melakukan perdagangan internasional, yaitu:

- Dapat meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber daya domestik yang dimilikinya terutama komoditi pertanian dan bahan mentah

- Dapat menciptakan pembagian kerja dan skala ekonomis yang lebih tinggi, terutama untuk produk manufaktur ringan
- Dapat digunakan sebagai wahana transmisi gagasan baru, teknologi yang lebih baru dan peningkatan kecakapan manajerial yang dibutuhkan dalam dunia usaha/bisnis
- Dapat merangsang aliran modal dan teknologi dari negara maju ke negara sedang berkembang
- Dapat memacu negara berkembang untuk menciptakan produk-produk baru yang diluncurkan negara maju terutama produk manufaktur bagi pengusaha negara berkembang karena permintaan domestik akan produk tersebut
- Merupakan instrumen yang efektif mencegah terjadinya monopoli karena adanya tuntutan kompetensi yang tinggi

Disamping keuntungan, perdagangan internasional juga mendatangkan kerugian bagi negara berkembang, mengingat posisi negara berkembang ada di pihak yang lemah yang bergantung kepada negara maju. Namun demikian keuntungan masih didapatkan negara berkembang dengan keikutsertaannya dalam perdagangan internasional karena bagi negara yang tidak melakukan perdagangan internasional maka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.

Berbicara mengenai perdagangan internasional tidaklah dapat dilepaskan dengan tidak membicarakan masalah tarif. Tarif merupakan komponen yang mengikuti setiap adanya kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Terjadinya kegiatan ekspor-impor dalam

perdagangan internasional diikuti dengan pengenaan tarif, khususnya tarif impor yang merupakan salah satu komponen yang mendatangkan pemasukan bagi negara. Selain itu tarif juga merupakan alat untuk melindungi sektor-sektor industri tertentu di dalam negeri dari tekanan persaingan produk impor.

Proses pembangunan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang tentu akan membawa perubahan yang mendasar atas struktur ekonomi negara tersebut. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan ekonomi tradisional yang biasanya dititik beratkan pada sektor pertanian beralih ke ekonomi modern yang biasanya didominasi oleh sektor industri. Meminjam istilah Kuznets (dalam Tulus Th Tambunan, 2001) bahwa perubahan struktur ekonomi secara umum disebut sebagai transformasi struktural yaitu rangkaian perubahan dalam komposisi permintaan, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), produksi dan penggunaan faktor produksi (tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi ini terjadi hampir di semua negara, tentu saja dengan proses dan pola yang berbeda untuk tiap-tiap negara/ tiap kelompok negara. Perbedaan tersebut terjadi karena beberapa hal, yaitu:

a. Kondisi dan Struktur Awal Ekonomi Dalam Negeri

Apabila suatu negara pada awal pembangunan merupakan negara agraris/ pertanian maka kemudian akan mengalami proses industrialisasi menuju sektor industri, dimulai dari tahap industri ringan, sedang ke industri berat. Namun apabila suatu negara pada awal pembangunan

sudah memiliki industri Dasar/ ringan (seperti mesin, besi, baja) maka akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat (menuju industri sedang / atau yang lebih besar lagi).

b. Besarnya Pasar Dalam Negeri

Dalam hal ini pasar dalam negeri ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan riil per kapita

c. Ciri Industrialisasi

Yang dimaksud dengan ciri industrialisasi adalah cara pelaksanaan (strategi yang diterapkan), jenis industri, pola pembangunan dan insentif yang diberikan

d. Keberadaan Sumber Daya Alam

Ada kecenderungan bahwa negara yang memiliki SDA lebih besar akan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah atau terlambat melakukan industrialisasi dibandingkan dengan negara yang memiliki SDA lebih sedikit.

e. Kebijakan atau Strategi Pemerintah yang Diterapkan

Pola industrialisasi di negara yang menerapkan kebijakan substitusi impor dan perdagangan luar negeri yang protektif akan berbeda dengan negara yang menerapkan kebijakan promosi ekspor

Dalam konsep industrialisasi, ada dua pilihan strategi/ kebijakan yaitu:

a. Strategi Substitusi Impor (SI)

Strategi ini lebih lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi kepada pasar domestik (dalam negeri), dan dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang pengganti impor.

Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam memilih strategi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya alam (bahan baku) dan faktor produksi (tenaga kerja) cukup tersedia sehingga biaya produksi menjadi rendah
2. Potensi permintaan di dalam negeri yang memadai
3. Mendorong sektor industri manufaktur di dalam negeri
4. Kesempatan kerja terbuka lebih luas dengan berkembangnya industri dalam negeri
5. Dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor yang berakibat berkurangnya defisit saldo neraca perdagangan dan menghemat cadangan devisa

b. Strategi Promosi Ekspor (PE)

Strategi ini lebih lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi ke pasar internasional dan dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat direalisasikan jika produk-produk yang dibuat di dalam negeri dijual ke pasar ekspor.

Beberapa syarat penting yang dapat digunakan dalam memilih strategi ini adalah sebagai berikut:

1. Pasar harus menciptakan signal harga yang benar, yang sepenuhnya merefleksikan kelangkaan dari barang yang bersangkutan, baik di pasar output maupun pasar input.
2. Tingkat proteksi impor harus rendah
3. Nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan
4. Harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor

Mengingat arti pentingnya perdagangan internasional bagi suatu negara termasuk Indonesia, maka di bawah ini dapat dilihat kondisi ekspor – impor yang telah dilakukan dalam lingkup daerah tingkat I (provinsi) dalam beberapa tahun terakhir.

Adapun data ekspor – impor Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Komoditas
Tahun 2003-2005 (dalam Juta USD)

| No | Kelompok Komoditas | 2003 (Nilai) | % | 2004 (Nilai) | % | 2005 (Nilai) | % |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1 | Peternakan | 61 348 584 | 2.88 | 64 502 229 | 2,77 | 48 229 828 | 1,81 |
| 2 | Pertanian & Kehutanan | 44 640 694 | 2.10 | 36 260 948 | 1,56 | 44 924 917 | 1,69 |
| 3 | Pertambangan & Pengeksploasian | 10 565 735 | 0.50 | 8 107 355 | 0,35 | 20 200 538 | 0,76 |
| 4 | Ind. Mkn, Min & Tembakau | 27 788 871 | 1.30 | 46 033 547 | 1,98 | 27 798 842 | 1,04 |
| 5 | Benang & Industri Tekstil | 610 478 279 | 28.67 | 767 728 452 | 32,99 | 950 396 500 | 35,70 |
| 6 | Ind..Kayu, Gabus & Jerami | 254 013 042 | 11.93 | 273 855 595 | 11,77 | 337 346 857 | 12,67 |
| 7 | Industri Kertas | 19 459 677 | 0.91 | 21 238 863 | 0,91 | 23 557 458 | 0,88 |
| 8 | Kulit & Industri Kulit | 12 249 862 | 0.58 | 14 384 589 | 0,62 | 17 034 286 | 0,64 |
| 9 | Ind. Kimia, Plastik & Karet | 99 006 087 | 4.65 | 103 508 085 | 4,45 | 110 296 678 | 4,14 |
| 11 | BBM | 264 081 426 | 12.40 | 287 728 283 | 12,36 | 264 204 120 | 9,92 |
| 12 | Perlengkapan Pribadi | 8 784 447 | 0.41 | 11 642 445 | 0,50 | 13 623 554 | 0,51 |
| 13 | Industri Mineral & Batuan | 34 363 470 | 1.61 | 34 377 000 | 1,48 | 45 067 611 | 1,69 |
| 14 | Industri Logam | 14 148 965 | 0.66 | 12 221 174 | 0,53 | 12 751 865 | 0,48 |
| 15 | Ind. Mesin, Listrik & Elektronik | 41 331 828 | 1.94 | 78 431 212 | 3,37 | 70 599 899 | 2,65 |
| 16 | Kendaraan & Spare-part | 23 527 636 | 1.10 | 925 534 | 0,04 | 5 635 447 | 0,21 |
| 17 | Industri Lainnya | 603 891 764 | 28.36 | 580 460 550 | 24,34 | 670 688 518 | 25,19 |
| | Jumlah | 2 129 680 357 | 100.00 | 2 327 405 861 | 100,00 | 2 662 356 918 | 100,00 |

Sumber: Statistik Ekspor Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah, 2003-2005

Dari data ekspor Jawa Tengah tahun 2003 – 2005 menunjukkan bahwa ekspor terbesar menurut komoditas adalah kelompok Benang dan industri Tekstil yaitu pada tahun 2003 sebesar 28,67%, tahun 2004 sebesar 32,99% dan tahun 2005 sebesar 35,70%. Perubahan prosentase kenaikan jumlah ekspor untuk komoditas kelompok benang dan tekstil adalah sebesar 25,76% (tahun 2003-2004) dan 23,79% (tahun 2004-2005). Hal ini dapat diartikan bahwa pada era tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 industri garment dan tekstil yang merupakan bagian dari komoditas kelompok ini ternyata paling banyak memberikan kontribusi atas ekspor dari Jawa Tengah.

Sedangkan data impor Jawa Tengah pada tahun yang sama, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Impor Jawa Tengah Menurut Komoditas
Tahun 2003 – 2005 (dalam Juta USD)

| No | Kelompok Komoditas | 2003 (Nilai) | % | 2004 (Nilai) | % | 2005 (Nilai) | % |
|----|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1 | Peternakan | 26,73 | 0,79 | 37,72 | 0,81 | 51,12 | 0,86 |
| 2 | Pertanian & Kehutanan | 92,36 | 2,72 | 134,36 | 2,89 | 111,59 | 1,87 |
| 3 | Pertambangan & Penggalian | 2,90 | 0,09 | 4,06 | 0,09 | 4,97 | 0,08 |
| 4 | Ind. Mkn, Min & Tembakau | 34,23 | 1,01 | 44,63 | 0,96 | 58,46 | 0,98 |
| 5 | Benang & Industri Tekstil | 216,02 | 6,35 | 279,43 | 6,00 | 213,12 | 3,58 |
| 6 | Ind. Kayu, Gabus & Jerami | 25,39 | 0,75 | 26,90 | 0,58 | 27,12 | 0,46 |
| 7 | Industri Kertas | 12,36 | 0,36 | 19,36 | 0,42 | 16,52 | 0,28 |
| 8 | Kulit & Industri Kulit | 4,91 | 0,14 | 6,32 | 0,14 | 4,59 | 0,08 |
| 9 | Ind. Kimia, Plastik & Karet | 137,55 | 4,05 | 179,35 | 3,85 | 178,17 | 2,99 |
| 11 | BBM | 2 587,87 | 76,11 | 3 630,21 | 78,01 | 4 743,92 | 79,68 |
| 12 | Perlengkapan Pribadi | 1,44 | 0,04 | 1,75 | 0,04 | 2,86 | 0,05 |
| 13 | Industri Mineral & Batuan | 17,61 | 0,52 | 13,31 | 0,29 | 12,72 | 0,21 |
| 14 | Industri Logam | 58,19 | 1,71 | 56,58 | 1,22 | 115,71 | 1,94 |
| 15 | Ind.Mesin,Listrik &Elektronik | 154,41 | 4,54 | 188,52 | 4,05 | 376,84 | 6,33 |
| 16 | Kendaraan & Spare-part | 17,26 | 0,51 | 16,65 | 0,36 | 22,47 | 0,38 |
| 17 | Industri Lainnya | 11,00 | 0,32 | 14,64 | 0,31 | 13,80 | 0,23 |
| | Jumlah | 3 499,24 | 100,00 | 4 653,78 | 100,00 | 5 953,98 | 100,00 |

Sumber: Statistik Impor Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah, 2003-2005

Pada tahun 2003 sampai tahun 2005 impor Jawa Tengah didominasi oleh kelompok komoditas BBM yaitu sebesar 76,11% pada tahun 2003, 78,01% pada tahun 2004 dan 79,68% pada tahun 2005, sehingga komoditas ini menyumbang lebih dari 50% dari total impor Jawa Tengah. Sedangkan tempat kedua adalah komoditas benang dan tekstil pada tahun 2003 dan 2004 sebesar 6,35% dan 6,00%. Untuk tahun 2005 kelompok komoditas ini menduduki tempat ketiga, setelah digeser oleh komoditas Mesin, Listrik dan Elektronik, yaitu sebesar 3,58%. Perubahan komoditas kelompok benang dan tekstil mengalami kenaikan pada tahun 2003-2004 sebesar 29,35% dan pada tahun 2004-2005 mengalami penurunan sebesar -23,73%. Meskipun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa kelompok komoditas benang dan tekstil ini mengambil peranan yang cukup besar dalam transaksi impor Jawa Tengah, terbukti dalam tiga tahun terakhir menduduki tiga besar komoditas impor di Jawa Tengah selain BBM serta Mesin, Listrik dan Elektronik.

1.2. Perumusan Masalah

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 merupakan salah satu wujud upaya pemerintah guna mendorong peningkatan ekspor dengan diberikan fasilitas Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor (KITE) bagi para pengusaha dengan memberikan kemudahan pada saat impor yaitu dengan Pembebasan pembayaran Bea Masuk dan Penangguhan PPN apabila terhadap barang jadi yang mengandung komponen bahan impor tersebut diekspor secara keseluruhan. Sedangkan

kriteria pengusaha yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah mereka yang memenuhi kategori pengusaha yang importir, eksportir sekaligus produsen. Keputusan tersebut diharapkan mampu mendorong kegiatan ekspor berbagai komoditi dengan pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Dengan diberlakukannya pemberian fasilitas tersebut yang mulai tahun 2004 dilaksanakan kembali oleh Bea Cukai, diharapkan:

- Dapat mendorong dunia usaha menggunakan fasilitas tersebut untuk melakukan kegiatan ekspor agar mampu bersaing dengan negara lain dalam perdagangan internasional.
- Dapat meningkatkan kontribusinya dalam pendapatan daerah / nasional.
- Dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri untuk dapat bersaing dengan negara lain untuk produk yang sama, dengan menggunakan bahan impor.

Sampai akhir tahun 2006 perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta berjumlah 104 perusahaan dari berbagai jenis komoditi. Sebagian besar merupakan industri garment & tekstil (24 perusahaan), industri Kulit & barang dari kulit (13 perusahaan) dan industri furniture /mebel (28 perusahaan) serta industri plastik/barang dari plastik (15 perusahaan).

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2004 – 2006, jumlah / nilai Fasilitas KITE yang telah diberikan untuk fasilitas pembebasan adalah:

Tabel 1.3
Nilai Fasilitas Pembebasan KITE Tahun 2004
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (dalam Rp)

| No. | Bulan | Nilai Fasilitas | Jumlah Register SK | Keterangan |
|-----|-----------|-----------------|--------------------|------------|
| 1 | Januari | 0 | 0 | |
| 2 | Pebruari | 0 | 0 | |
| 3 | Maret | 176.993.159.550 | 12 | |
| 4 | April | 109.528.861.218 | 17 | |
| 5 | Mei | 58.982.806.193 | 12 | |
| 6 | Juni | 132.655.256.343 | 16 | |
| 7 | Juli | 50.175.238.492 | 14 | |
| 8 | Agustus | 55.131.005.032 | 14 | |
| 9 | September | 34.065.663.059 | 12 | |
| 10 | Oktober | 89.627.774.642 | 8 | |
| 11 | Nopember | 88.897.371.321 | 9 | |
| 12 | Desember | 34.668.218.504 | 13 | |
| | Jumlah | 830.725.354.354 | 127 | |

Sumber: Kanwil DJBC Jawa Tengah & DIY

Pada tahun 2004, nilai fasilitas pembebasan yang telah disetujui berjumlah Rp. 830.725.354.354,- yang terdiri dari 127 buah Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan yang berasal dari 84 perusahaan.

Tabel 1.4
Nilai Fasilitas Pembebasan KITE Tahun 2005
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (dalam Rp)

| No. | Bulan | Nilai Fasilitas | Jumlah Register SK | Keterangan |
|-----|-----------|-----------------|--------------------|------------|
| 1 | Januari | 55.803.341.075 | 9 | |
| 2 | Pebruari | 29.154.943.217 | 8 | |
| 3 | Maret | 131.845.228.974 | 8 | |
| 4 | April | 61.305.009.004 | 11 | |
| 5 | Mei | 127.645.863.439 | 12 | |
| 6 | Juni | 65.004.286.548 | 13 | |
| 7 | Juli | 74.044.843.025 | 11 | |
| 8 | Agustus | 71.926.175.297 | 17 | |
| 9 | September | 36.811.714.060 | 9 | |
| 10 | Oktober | 60.490.282.939 | 12 | |
| 11 | Nopember | 60.702.608.388 | 10 | |
| 12 | Desember | 56.811.289.702 | 17 | |
| | Jumlah | 831.545.585.668 | 137 | |

Sumber: Kanwil DJBC Jawa Tengah & DIY

Pada tahun 2005, nilai fasilitas pembebasan yang telah disetujui berjumlah Rp. 831.545.585.668,- yang terdiri dari 137 Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan yang berasal dari 105 perusahaan.

Tabel 1.5
Nilai Fasilitas Pembebasan KITE Tahun 2006
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (dalam Rp)

| No. | Bulan | Nilai Fasilitas | Jumlah Register SK | Keterangan |
|-----|-----------|-----------------|--------------------|------------|
| 1 | Januari | 25.054.579.342 | 3 | |
| 2 | Pebruari | 71.819.260.741 | 8 | |
| 3 | Maret | 75.952.536.807 | 5 | |
| 4 | April | 80.509.389.826 | 12 | |
| 5 | Mei | 95.575.757.995 | 14 | |
| 6 | Juni | 89.210.573.126 | 13 | |
| 7 | Juli | 15.002.958.785 | 6 | |
| 8 | Agustus | 50.324.430.129 | 13 | |
| 9 | September | 92.917.384.778 | 12 | |
| 10 | Oktober | 2.578.089.523 | 5 | |
| 11 | Nopember | 74.608.499.512 | 14 | |
| 12 | Desember | 17.753.055.469 | 7 | |
| | Jumlah | 691.306.516.033 | 112 | |

Sumber: Kanwil DJBC Jawa Tengah & DIY

Pada tahun 2006, nilai fasilitas pembebasan yang telah disetujui berjumlah Rp. 691.306.516.033,- yang terdiri dari 112 buah Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan yang berasal dari 78 perusahaan.

Adapun perbandingan nilai fasilitas untuk tahun 2004 – 2006, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Fasilitas Pembebasan KITE Tahun 2004-2006
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

| No. | Tahun | Nilai Fasilitas | % | Jumlah SK | % | Jumlah Perusahaan | % |
|-----|--------|-------------------|--------|-----------|--------|-------------------|--------|
| 1 | 2004 | 830.725.354.354 | | 127 | | 84 | |
| 2 | 2005 | 831.545.585.668 | 5,625 | 137 | 7,87 | 105 | 25 |
| 3 | 2006 | 691.306.516.033 | -16,86 | 112 | -18,25 | 78 | -25,71 |
| | Jumlah | 2.353.577.456.055 | | 376 | | | |

Sumber: Kanwil DJBC Jawa Tengah & DIY

Pada tahun 2005 terjadi peningkatan pemberian fasilitas sebesar 5,625%, namun pada tahun 2006 terjadi penurunan pemberian fasilitas sebesar 16,86%. Penurunan ini terjadi karena jumlah perusahaan aktif yang menggunakan fasilitas juga mengalami penurunan jumlah sebesar 25,71% pada tahun 2006 sedangkan pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 25%. Total Fasilitas yang telah diberikan pada tahun 2004-2006 mencapai Rp 2.353.577.456.055,- dengan menerbitkan 376 SK Fasilitas Pembebasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada ketertarikan untuk meneliti apakah pemberian Fasilitas KITE (dalam hal ini adalah Fasilitas Pembebasan Bahan Baku) berdampak terhadap impor bahan bakunya. Terutama untuk industri garment dan tekstil, mengingat posisi komoditas ini ada di peringkat tiga besar untuk impor di Jawa Tengah selama tahun 2004-2006.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan permasalahan penelitian sebagai berikut:

2. Bagaimana pengaruh pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terhadap industri garment dan tekstil yang mendapat fasilitas.
3. Bagaimana pengaruh perubahan harga bahan baku impor pada industri garment dan tekstil terhadap volume impor bahan baku.
4. Bagaimana pengaruh ekspor garment dan tekstil terhadap impor bahan baku utama-nya.

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis pengaruh/dampak perubahan harga bahan baku pada industri garment dan tekstil di Jawa Tengah terhadap volume impor bahan bakunya.
2. Menganalisis pengaruh ekspor garment dan tekstil terhadap impor bahan baku utama-nya.
3. Menganalisis pengaruh/dampak pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terhadap impor bahan baku untuk industri garment dan tekstil di Jawa Tengah.

Adapun manfaat hasil penelitian adalah:

1. Sebagai bahan masukan/sumbang saran bagi pihak yang membutuhkan, terutama pemerintah atau instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan

dan mengoptimalkan pemberian fasilitas kemudahan impor dalam meningkatkan perekonomian.

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pentingnya Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara sudah terjadi sejak zaman dahulu, tentu saja dengan ruang lingkup yang terbatas. Perdagangan terjadi karena pemenuhan kebutuhan dalam negeri tidak dapat dipenuhi (tidak dapat diproduksi di dalam negeri) sehingga akan dipenuhi dengan mendatangkan barang dari negara lain dan muncullah apa yang kemudian disebut dengan transaksi perdagangan internasional. Pada mulanya transaksi tersebut dilakukan dengan cara barter (pertukaran langsung barang dengan barang lain yang dibutuhkan kedua belah pihak, yang masing-masing tidak dapat memproduksi barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri)

Pertukaran/ perdagangan dapat terjadi karena adanya perbedaan di kedua negara, antara lain dalam hal kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia/ tenaga kerja, struktur ekonomi, kondisi iklim, keadaan geografis. Adanya perbedaan tersebut dan atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, maka terjadilah pertukaran yang kemudian secara umum dapat dikatakan sebagai perdagangan internasional.

Adapun sebab-sebab umum yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah sebagai berikut (Halwani.2005):

1. Sumber daya alam (*natural resources*)
2. Sumber daya modal (*capital resources*)
3. Tenaga kerja (*human resources*)
4. Teknologi

Dalam ekonomi makro, perdagangan internasional terjadi karena adanya pertukaran barang antar dua negara yang saling menguntungkan (terjadi kegiatan ekspor-impor), sehingga dapat dirumuskan sebagai:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dimana:

Y = Pendapatan Nasional

C = pengeluaran konsumsi

I = Investasi

G = pengeluaran pemerintah

X = pengeluaran ekspor

M = pengeluaran impor

Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikut: (Hamdy, 2001)

1. Kebijakan Tarif Barrier

Kebijakan Tarif Barrier dalam bentuk bea masuk adalah sebagai berikut:

- a. Pembebasan bea masuk/tarif rendah (0% - 5%) dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital seperti beras, mesin-mesin vital, alat-alat militer/ pertahanan keamanan
- b. Tarif sedang (> 5% - 20%) dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri.
- c. Tarif tinggi (> 20%) dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok.

Dalam pelaksanaannya, sistem/cara pemungutan tarif bea masuk ini dapat dibedakan sebagai berikut;

- a. Bea Harga (*Ad Valorem Tariff*)

Yaitu pungutan bea masuk atas barang impor yang ditentukan oleh tingkat prosentase tarif dikalikan harga CIF barang tersebut.

Misalnya tarif BM = 5% ($BM = 5\% \times CIF \times Kurs/Rp$)

- b. Bea Spesifik (*Spesific Tariff*)

Yaitu pungutan bea masuk yang didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor.

Misalnya tarif BM untuk semen Rp 3.000,00 per ton

- c. Bea Campuran (*Compound Tariff*)

Yaitu pungutan bea masuk yang merupakan kombinasi system

a. dan sistem b.

2. Kebijakan Nontarif Barrier

Kebijakan Nontarif Barrier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional, yang secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pembatasan Spesifik (*Spesific Limitation*)

Misalnya:

- 1) Larangan impor secara mutlak
- 2) Pembatasan impor (*quota system*)
- 3) Peraturan kesehatan/ karantina
- 4) Peraturan pertahanan dan keamanan negara

b. Peraturan Bea Cukai (*Customs Administration Rules*)

Misalnya:

- 1) Tatalaksana impor tertentu
- 2) Penetapan harga pabean
- 3) Penetapan kurs valas dan pengawasan devisa

c. *Government Participation*

Misalnya:

- 1) Kebijakan pengadaan pemerintah
- 2) Subsidi dan insentif ekspor

d. *Import Charges*

Misalnya:

- 1) *Import deposits*

2) *Supplementary duties*

2.1.2. Term Of Trade

Term Of Trade (TOT) adalah perbandingan kuantitatif (jumlah atau nilai) antara ekspor dan impor yang mencerminkan perkembangan posisi perdagangan suatu negara untuk periode waktu tertentu.

Konsep TOT terbagi atas:

1) *Gross Barter TOT*

$$G = \frac{Q_x}{Q_m} \times 100$$

Q_x = indeks kuantitas ekspor

Q_m = indeks kuantitas impor

100` = indeks tahun dasar

Apabila terjadi kenaikan *gross barter* ($G > 100$) berarti perkembangan posisi perdagangan luar negeri negara tersebut kurang baik atau kurang menguntungkan karena diperluksn ekspor yang lebih besar untuk mendapatkan sejumlah impor tertentu.

2) *Net Barter TOT* atau *commodity TOT*

$$N = \frac{P_x}{P_m} \times 100$$

P_x = indeks harga ekspor

P_m = indeks harga impor

100 = indeks tahun dasar

Apabila terjadi kenaikan net barter TOT ($N > 100$) berarti terjadi perkembangan perdagangan luar negeri yang positif/ baik karena dengan nilai ekspor tertentu akan diperoleh nilai impor yang lebih besar.

Sebagai contoh:

Tahun 1960 sebagai tahun dasar ($N = 100$),

Akhir tahun 1995, P_x suatu negara turun 5% sehingga menjadi 95%, sedangkan P_m meningkat 10% sehingga menjadi 110%

Maka nilai tukar perdagangan (*comodity terms of trade*) negara tersebut akan mengalami kemerosotan menjadi:

$$N = \frac{95}{110} \times 100 = 86,36$$

Berarti antara tahun 1960 sampai tahun 1995, harga-harga komoditi ekspor negara tersebut mengalami penurunan sebesar hampir 14% (13,64%) apabila dikaitkan dengan harga komoditi impornya.

3) *Income* TOT

$$I = \frac{P_x}{P_m} \times Q_x = N \times Q_x$$

Px = indeks harga ekspor

Pm = indeks harga impor

Qx = indeks volume ekspor

I = untuk mengukur kapasitas impor suatu negara didasarkan pada kemampuan ekspornya

Konsep *income* TOT ini lebih penting bagi negara sedang berkembang (NSB) karena mencerminkan kemampuannya untuk mengimpor barang-barang modal pembangunan dari hasil ekspornya.

Sebagai contoh:

Px 1995 = 95%

Pm 1995 = 110%

Qx 1995 = 120%

(volume ekspor meningkat dari 100 pada tahun 1960 menjadi 120 pada tahun 1995)

Maka nilai tukar perdagangan berkenaan dengan pendapatan negara tersebut akan mengalami peningkatan menjadi:

$$I = \frac{95}{110} \times 120 = 0,8636 \times 120 = 103,63$$

Berarti untuk periode 1960 – 1995 kapasitas impor (kemampuan mengimpor) negara tersebut

didasarkan pada kemampuan ekspornya akan mengalami peningkatan sebesar 3,63% meskipun P_x/P_m mengalami penurunan.

4) *Single factor* TOT

$$S = \frac{P_x}{P_m} \times Z_x$$

P_x = indeks harga ekspor

P_m = indeks harga impor

Z_x = indeks produktivitas dalam sektor ekonomi atau sektor industri di suatu negara yang memproduksi komoditi ekspor

S = untuk mengukur jumlah impor yang dapat diperoleh suatu negara berdasarkan satuan unit faktor produksi domestik yang terkandung dalam komoditi ekspornya

Sebagai contoh:

P_x 1995 = 95%

P_m 1995 = 110%

Z_x 1995 = 130%

(produktivitas pada sektor penghasil komoditi ekspor di suatu negara mengalami kenaikan dari 100 pada tahun 1960 menjadi 130 pada tahun 1995)

Maka nilai tukar perdagangan faktor tunggal negara tersebut mengalami kenaikan menjadi:

$$S = \frac{95}{110} \times 130 = 0,8636 \times 130 = 112,27$$

Berarti pada tahun 1995 negara tersebut menerima impor 12,27% lebih banyak dari setiap satuan atau unit faktor produksi domestik yang terkandung dalam eksportnya dibandingkan apabila diperoleh dalam tahun 1960. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas negara tersebut khususnya dalam sektor ekspor mengalami peningkatan yang mengakibatkan kondisi perdagangannya secara umum mengalami perbaikan pada tahun 1995 jika dibandingkan kondisi perdagangannya pada tahun 1960 (dengan indikasi kenaikan I meskipun N turun)

5) *Double Factor/TOT*

$$D = \frac{P_x}{P_m} \times \frac{Z_x}{Z_m} \times 100$$

P_x = indeks harga ekspor

P_m = indeks harga impor

Z_x = indeks produktivitas dalam sektor ekonomi atau sektor industri di suatu negara yang memproduksi komoditi ekspor

Z_m = indeks produktivitas impor

D = untuk menghitung seberapa banyak unit faktor produksi domestik yang terkandung dalam ekspor suatu negara dipertukarkan dengan satu unit faktor produksi negara lain yang terkandung dalam impornya

Sebagai contoh:

P_x 1995 = 95%

P_m 1995 = 110%

Z_x 1995 = 130%

Z_m 1995 = 105%

(Z_m meningkat dari 100 pada tahun 1960 menjadi 105 pada tahun 1995)

Maka nilai tukar perdagangan akan mengalami peningkatan menjadi:

$$D = \frac{95}{110} \times \frac{130}{105} \times 100 = 0,8636 \times 1,2391 \times 100 = 106,92$$

2.1.3. Teori Keunggulan Komparatif

Sedangkan berdasarkan teori perdagangan tradisional, setiap negara yang terlibat dalam hubungan dagang antar negara akan terdorong dalam spesialisasi produk dan ekspor komoditi yang memiliki keunggulan

komparatif sehingga masing-masing negara akan melakukan spesialisasi produk yang memiliki keunggulan. Hukum keunggulan komparatif ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1817 dengan penerbitan buku berjudul *Principles of Political Economy and Taxation*. Hukum ini merupakan salah satu hukum penting dalam perdagangan internasional dan masih belum mendapat tantangan dari pihak lain.

Menurut Salvatore.1997 hukum keunggulan komparatif, meskipun sebuah negara kurang efisien dibanding (atau memiliki kerugian absolut terhadap) negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. negara pertama harus melakukan spesialisasi mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih kecil (ini merupakan komoditi dengan keunggulan komparatif) dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih besar (komoditi ini memiliki kerugian komparatif). Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Keunggulan Komparatif

| | Amerika Serikat | Inggris |
|---------------------------|-----------------|---------|
| Gandum (karung/jam kerja) | 6 | 1 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| | | |
| Kain (meter/jam kerja) | 4 | 2 |

Dari tabel dapat diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki keunggulan absolut untuk produk gandum dan kain dibandingkan Inggris. Namun karena keunggulan absolut pada gandum ($6/1$) lebih besar dari kain ($4/2$) maka dalam hal ini Amerika Serikat memiliki keunggulan komparatif untuk gandum. Sedangkan untuk satuan waktu penyelesaian yang sama (per jam kerja) Inggris dapat memproduksi sejumlah $2/4$ nya dari yang diproduksi Amerika dan untuk gandum hanya dapat diproduksi $1/6$ nya dari produksi Amerika. Sehingga Inggris dapat dikatakan memiliki keunggulan komparatif untuk produk kain. Jadi menurut hukum keunggulan komparatif, kedua negara dapat memperoleh keuntungan apabila Amerika melakukan spesialisasi produk gandum dan Inggris melakukan spesialisasi produk kain dan kemudian saling dipertukarkan/diperdagangkan.

Dalam jangka pendek pola tersebut dapat memaksimalkan kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Namun dalam jangka panjang pola spesialisasi tersebut bagi negara berkembang merupakan hal yang harus dihindari supaya tidak selalu berada di

bawah pengaruh negara maju, yang pada akhirnya tidak dapat memaksimalkan kesejahteraannya.

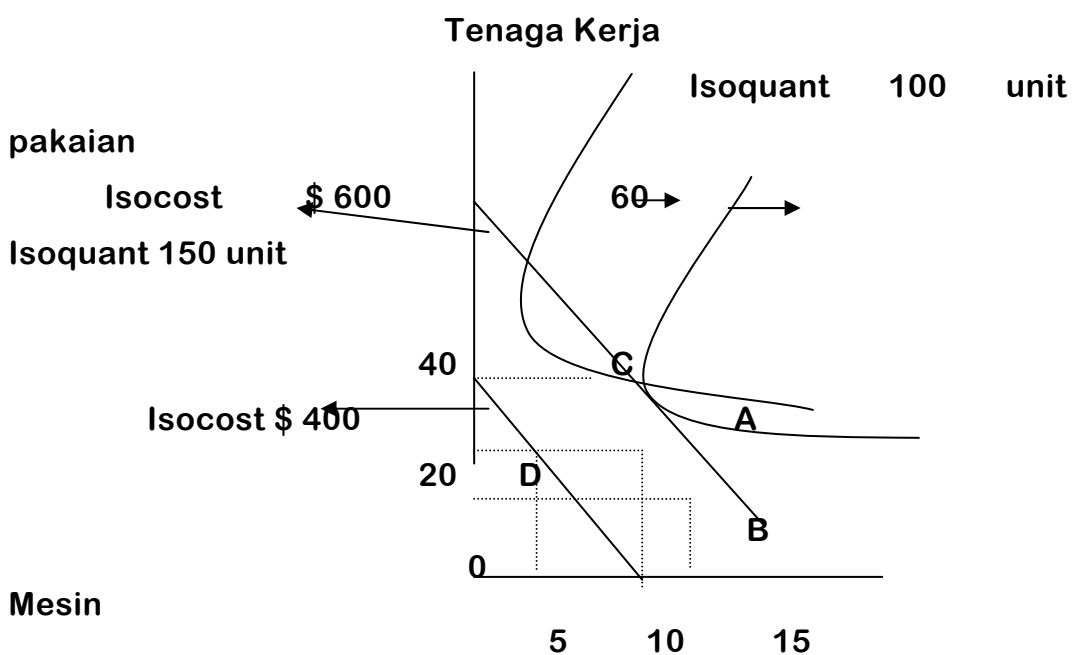
2.1.4. Teori H-O (Eli Hecksher dan Bertil Ohlin)

Menurut Hamdy.2001, teori yang dikemukakan oleh Hecksher dan Ohlin ini dikenal dengan *The Proportional Factors Theory*, bahwa perbedaan *opportunity Cost* suatu produk antara satu negara dengan negara yang lain dapat terjadi karena perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Perbedaan inilah yang dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak/ murah dalam memproduksinya, akan melakukan spesialisasi produksi dan akan mengekspornya.

Teori ini menggunakan 2 kurva dalam analisisnya, yaitu kurva *Isocost* dan kurva *Isoquant*. Kurva *Isocost* adalah kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama dan kurva *Isoquant* adalah kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Kedua kurva akan bersinggungan pada suatu titik yang optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya yang minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu.

Keadaan tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Teori Hecksher-Ohlin



Titik A, B, C berada pada *Isocost* yang sama yaitu \$600, dengan kombinasi input/ faktor produksi yang berbeda. Pada titik A (25 TK, 10M), titik B (15 TK, 12 M) dan titik C (40 TK, 5 M), sedangkan titik D (20 TK, 5 M) berada di Isocost \$400. Titik B, C, D berada pada *Isoquant* yang menunjukkan jumlah produksi yang sama yaitu sebanyak 100 unit pakaian.

Pada titik singgung antara *Isocost* dan *Isoquant* merupakan titik optimal, yang berarti dengan kombinasi biaya faktor produksi minimal akan dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Pada gambar di atas, yang menggambarkan titik optimal adalah titik D, yaitu dengan kombinasi input 20 TK dan 5 M dapat menghasilkan 100 unit pakaian dengan *Isocost* \$400

Berdasarkan teori bahwa titik singgung antara *Isocost* dan *Isoquant* merupakan posisi optimal, yaitu dengan kombinasi biaya faktor produksi akan dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Sesuai dengan konsep titik singgung ini maka masing-masing negara tentu cenderung memproduksi barang tertentu dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal sesuai struktur/ proporsi faktor produksi yang dimilikinya.

Menurut Salvatore.1996 teori perdagangan H-O dilandaskan pada asumsi-asumsi, antara lain:

- 1) Di dunia hanya terdapat dua negara saja (negara 1 dan negara 2), dua komoditi (komoditi X dan komoditi Y) dan dua faktor produksi (tenaga kerja dan modal)
- 2) Kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi produksi yang persis sama

- 3) Komoditi X secara umum bersifat padat karya atau padat tenaga kerja (*labor intensive*) sedangkan komoditi Y secara umum bersifat padat modal (*capital intensive*). Hal ini berlaku untuk kedua negara
- 4) Kedua komoditi tersebut sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan (*constant return of scale*) dan hal ini sama-sama terjadi di kedua negara
- 5) Spesialisasi produksi yang berlangsung di kedua negara sama-sama tidak lengkap atau tidak menyeluruh, artinya masing-masing negara tetap memproduksi kedua jenis komoditi itu secara sekaligus meskipun dalam komposisi yang berbeda
- 6) Selera atau preferensi-preferensi permintaan para konsumen yang ada di kedua negara itu persis sama
- 7) Terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan juga dalam pasar faktor
- 8) Terdapat mobilitas faktor yang sempurna dalam ruang lingkup masing-masing negara namun tidak ada mobilitas faktor antar negara/ internasional
- 9) Sama sekali tidak ada biaya transportasi, tarif atau bentuk hambatan lainnya yang dapat mengurangi

kebebasan arus perdagangan barang yang berlangsung di antara kedua negara tersebut

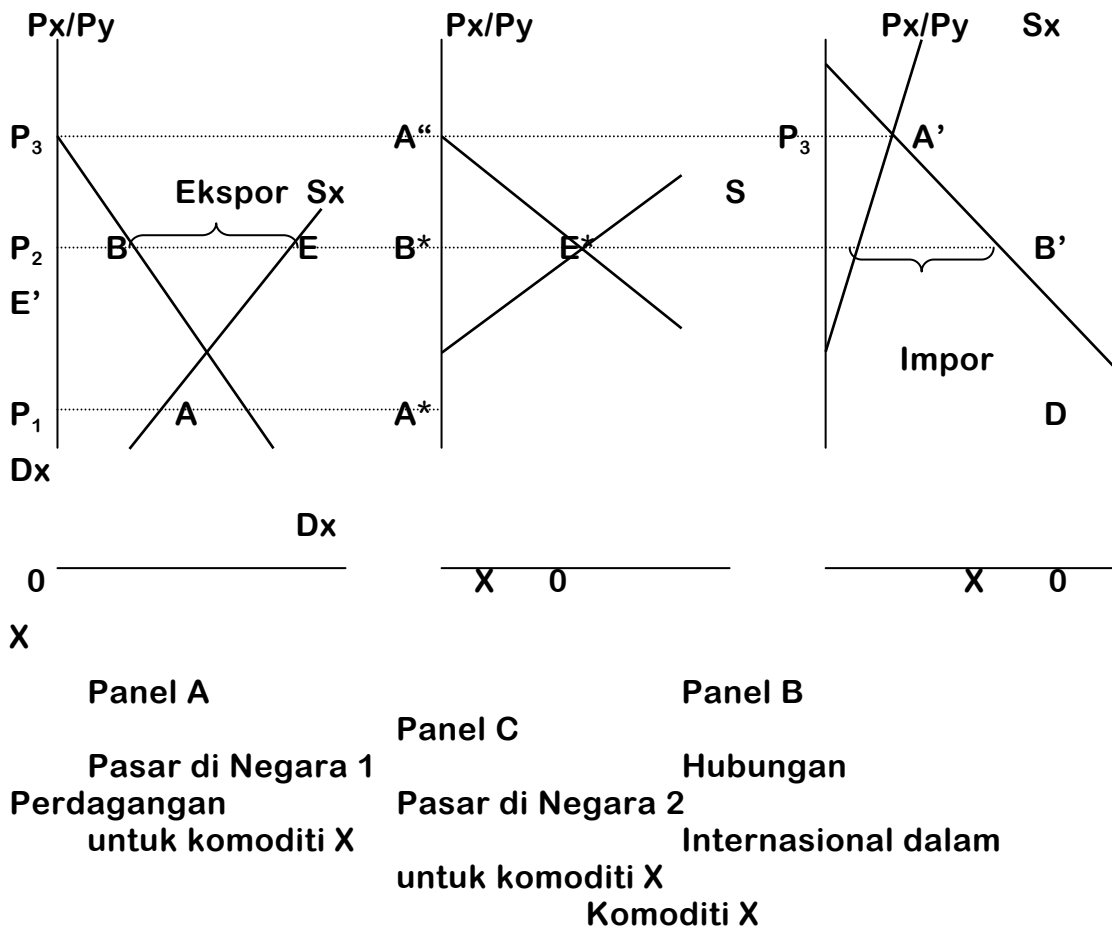
- 10) Semua sumber daya produktif atau faktor produksi yang ada di masing-masing negara dapat dikerjakan secara penuh dalam kegiatan-kegiatan produksi
- 11) Perdagangan internasional yang terjadi di antara negara 1 dan negara 2 sepenuhnya seimbang

2.1.5. Analisis Keseimbangan Parsial

Dengan terjadinya perdagangan internasional maka akan berlangsung hubungan yang saling menguntungkan antar dua negara. Harga barang akan tercipta setelah terjadinya hubungan dagang dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga tersedia cukup waktu bagi kekuatan penawaran dan permintaan untuk saling bertemu dan menentukan harga. Untuk mengetahui proses terciptanya harga relatif ekuilibrium dapat menggunakan analisis keseimbangan parsial (yakni dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran). Setelah itu baru menggunakan analisis keseimbangan umum yang lebih kompleks.

Adapun proses terjadinya harga komoditi relatif ekuilibrium dengan adanya perdagangan apabila dilihat dari analisis keseimbangan parsial, dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.2
Harga Komoditi Relatif Ekuilibrium setelah
Perdagangan
Ditinjau dari Analisis Keseimbangan Parsial



Pada Panel A menunjukkan bahwa adanya perdagangan internasional, maka negara 1 akan memproduksi dan mengkonsumsi di titik A berdasarkan harga

relatif komoditi X sebesar P_1 , sedangkan negara 2 akan memproduksi dan mengkonsumsi di titik A' berdasarkan harga relatif P_3 . Setelah terjadinya hubungan perdagangan antara kedua negara tersebut maka harga relatif komoditi X berkisar di antara P_1 dan P_3 seandainya kedua negara tersebut cukup besar (kekuatan ekonominya). Apabila harga yang berlaku adalah di atas P_1 maka negara 1 akan memasok dan memproduksi komoditi X lebih banyak daripada tingkat permintaan (konsumsi) domestik. Kelebihan produksi ini selanjutnya akan diekspor (lihat Panel A) ke negara 2. Apabila harga yang berlaku adalah lebih kecil dari P_3 maka negara 2 akan mengalami peningkatan permintaan yang lebih tinggi dari produksi domestik, sehingga akan mendorong negara 2 untuk mengimpor kekurangan kebutuhan atas komoditi X dari negara 1 (lihat Panel C).

Jadi pada Panel A memperlihatkan bahwa berdasarkan harga relatif P_1 , kuantitas komoditi X yang ditawarkan (Q_{Sx}) akan sama dengan kuantitas yang diminta (Q_{Dx}) oleh konsumen di negara 1 sehingga negara ini tidak mengekspor komoditi X sama sekali. Hal tersebut memunculkan titik A* pada kurva S di panel B yang merupakan kurva penawaran ekspor negara 1.

Apabila berdasarkan harga relatif P_2 maka akan terjadi kelebihan penawaran (Q_{Sx}) dibanding dengan permintaan komoditi X (Q_{Dx}) yaitu sebesar BE yang merupakan kuantitas komoditi X yang akan diekspor Negara 1. Kuantitas BE sama dengan kuantitas B^*E^* pada Panel B, dimana terletak titik E^* yang berpotongan dengan kurva penawaran ekspor komoditi X dari Negara 1 (kurva S).

Sementara pada Panel C memperlihatkan bahwa berdasarkan harga relative P_3 maka penawaran dan permintaan komoditi X akan sama besarnya atau sebesar $Q_{Dx} = Q_{Sx}$ di titik A' sehingga Negara 2 tidak mengimpor komoditi X sama sekali. Hal tersebut dilambangkan dengan titik A'' yang terletak pada kurva permintaan impor komoditi X Negara 2 (kurva D) yang berada di Panel B. Pada harga relatif P_2 ini akan terjadi kelebihan permintaan komoditi X ($Q_{Dx} > Q_{Sx}$) sebesar $B'E'$ yang kuantitasnya akan sama besar dengan B^*E^* pada Panel B dimana terletak titik E^* yang merupakan tingkat permintaan impor komoditi X dari Negara 2 (kurva D).

Berdasarkan harga relatif P_2 , kuantitas impor komoditi X yang diminta Negara 2 ($B'E'$ dalam Panel C) sama dengan kuantitas ekspor komoditi X yang ditawarkan

Negara 1 (BE dalam Panel A). Setelah kedua Negara melakukan perdagangan atas komoditi X maka terjadi perpotongan antara kurva D dan kurva S pada Panel B, yang memunculkan harga relatif P_2 sebagai harga relatif ekuilibrium untuk komoditi X.

Pada Panel B juga dapat dilihat bahwa apabila $P_x/P_y > P_2$ maka kuantitas ekspor komoditi X yang ditawarkan akan melebihi tingkat permintaan impor sehingga lambat laun harga relatif komoditi X akan mengalami penurunan hingga pada akhirnya akan sama dengan P_2 . Apabila $P_x/P_y < P_2$ maka kuantitas impor komoditi X yang diminta akan melebihi kuantitas ekspor yang ditawarkan sehingga P_x/P_y akan meningkat dan pada akhirnya akan sama dengan P_2 .

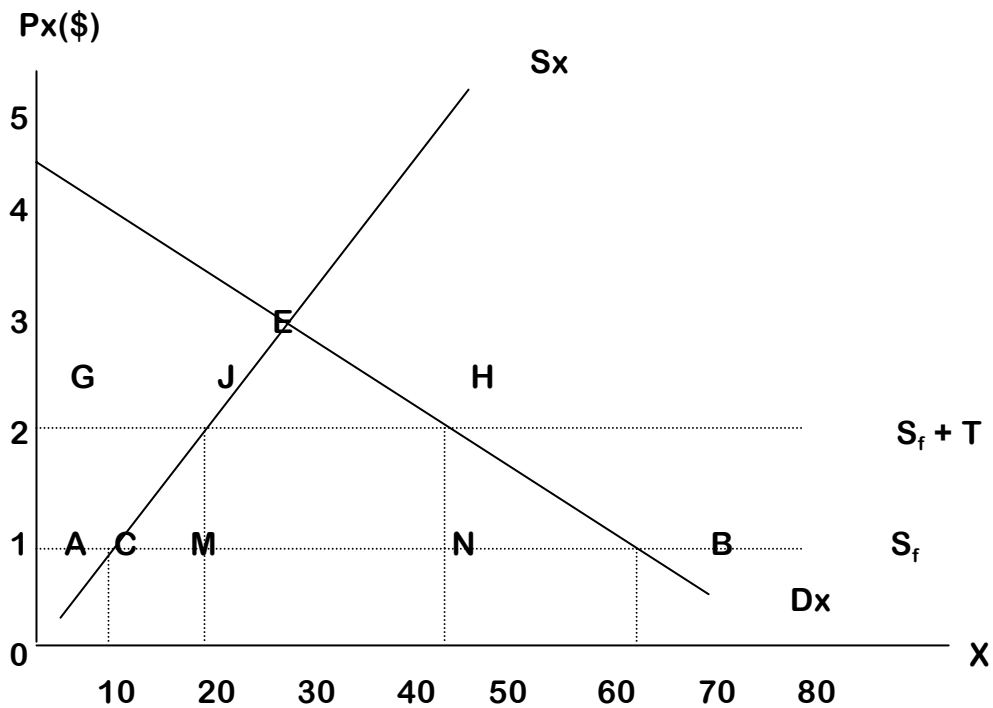
2.1.6. Dampak Keseimbangan Parsial akibat Tarif

Analisis Keseimbangan Parsial merupakan instrumen analitis yang paling sesuai untuk mempelajari kasus pemberlakuan tarif oleh sebuah negara kecil (kecil disini diartikan sebagai keterbatasan kemampuan negara yang bersangkutan sehingga tidak mampu mempengaruhi harga dunia, dan harus menerima harga-harga yang berlaku di

pasar internasional), serta keterkaitannya dengan output industri domestiknya yang juga relatif kecil.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemberlakuan tarif terhadap keseimbangan parsial, dapat dipelajari melalui gambar berikut ini:

Gambar 2.3
Dampak Keseimbangan Parsial Akibat Pemberlakuan Tarif



Pada gambar di atas diketahui bahwa S_x adalah kurva penawaran atas komoditi X di suatu negara, sedangkan D_x adalah kurva permintaan untuk komoditi X . Apabila negara tersebut sama sekali tidak melakukan perdagangan internasional maka Negara tersebut akan mengalami keseimbangan di titik E yang merupakan

perpotongan kurva D_x dan S_x . Pada titik E tersebut, negara akan mengkonsumsi komoditi X sebesar 30 unit dengan harga $P_x = 3\$$ per unit .

Selanjutnya apabila Negara tersebut melakukan perdagangan internasional maka akan menikmati komoditi X dengan harga yang lebih murah yaitu $P_x = 1\$$ per unit dan akan mengkonsumsi 70 unit X (AB). Dari jumlah tersebut 10 unit X merupakan produksi domestic sedangkan 60 unit X (CB) merupakan komoditi yang diimpor. Garis horizontal S_f merupakan kurva penawaran komoditi X dari luar negeri yang elastis tak terbatas untuk negara tersebut. Artinya bahwa pasar-pasar internasional akan sanggup memasok komoditi X sebanyak yang diperlukan negara tersebut berdasarkan harga dunia yang berlaku.

Apabila kemudian atas barang impor tersebut dikenakan tarif ad valorem sebesar 100% terhadap komoditi X, maka harga atau P_x yang harus dipikul konsumen untuk menikmati komoditi X akan mengalami kenaikan menjadi $P_x = 2\$$ per unit. Atas kenaikan harga tersebut, negara akan menurunkan tingkat konsumsi komoditi X menjadi 50 unit X (GH) dengan perincian untuk 20 unit X (GJ) merupakan produksi domestik dan 30 unit X (JH) merupakan komoditi yang diimpor dari negara lain.

Sedangkan garis horisontal $S_f + T$ merupakan kurva penawaran baru yang sudah memperhitungkan dampak tarif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dampak pemberlakuan tarif terhadap konsumsi (*consumption effect of the tariff*) yaitu berkurangnya konsumsi domestik akibat pengenaan tarif ad valorem adalah sebesar 20 unit X (BN)
- b. Dampak pengenaan tariff terhadap produksi (*production effect of the tariff*) yaitu peningkatan produksi domestik karena adanya tariff adalah sebesar 10 unit X (CM)
- c. Dampak pengenaan taif terhadap perdagangan (*trade effect of the tariff*) yaitu dengan turunnya impor adalah sebesar 30 unit X (BN + CM)
- d. Dampak pengenaan tarif terhadap penerimaan pemerintah (*revenue effect of the tariff*) yaitu terciptanya pemasukan bagi pemerintah adalah sebesar 30\$ yang berasal dari perhitungan 30 unit X yang diimpor (MJHN) dengan harga $P_x = 1\$$ per unit.

Elastisitas kurva permintaan maupun kurva penawaran akan mengakibatkan:

- a) Dampak konsumsi (*consumption effect*) dapat terjadi karena adanya kenaikan harga komoditi X sebanyak 1 \$ akibat pemberlakuan tarif yang diakibatkan semakin elastis kurva permintaan (D_x) akan semakin mendatar bentuk kurvanya.
- b) Dampak produksi (*production effect*) akan semakin besar yang ditimbulkan oleh kenaikan harga komoditi X karena pemberlakuan tarif. Hal tersebut ditandai dengan semakin elastisnya kurva S_x .
- c) Dampak perdagangan (*trade effect*) akan semakin besar karena adanya kenaikan harga komoditi X akibat pemberlakuan tarif yang ditandai dengan semakin elastis kurva D_x dan S_x .
- d) Dampak pendapatan (*revenue effect*) akan semakin menurun bagi pemerintah

2.1.7. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 merupakan dasar pemberian fasilitas kemudahan impor yang diberikan. Kemudian dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: Kep-205/BC/2003 tanggal

31-12-2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan pengawasannya.

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau yang kemudian disebut sebagai KITE adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Jadi pemberian fasilitas KITE terdiri dari fasilitas Pembebasan dan fasilitas Pengembalian.

Fasilitas pembebasan adalah pembebasan Bea masuk (BM) dan/atau Cukai atas impor barang untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat. Sedangkan fasilitas Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke kawasan Berikat.

2.1.8. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan teori permintaan dan penawaran, ME Perseveranda (2005) melakukan penelitian tentang Permintaan Ekspor Kopi daerah Nusa Tenggara Timur ke Jepang. Analisis penelitian ini menggunakan model Dinamis ECM (*Error Correction Models*) dan PAM (*Parsial Adjustment Model*) dengan data *time series*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang dan pendek harga kopi robusta dunia berpengaruh negatif terhadap permintaan ekspor kopi NTT, harga kopi arabica dunia berpengaruh positif terhadap permintaan ekspor kopi, kurs valuta asing berpengaruh negatif terhadap permintaan ekspor kopi, GNP per kapita Jepang berpengaruh positif terhadap permintaan ekspor kopi, dan konsumsi kopi Jepang berpengaruh positif terhadap permintaan ekspor kopi.

Meskipun penelitian tersebut tidak digunakan sebagai salah satu acuan pokok dalam penelitian ini, namun hasil yang diperoleh setidaknya memberikan suatu gambaran adanya aliran barang keluar masuk suatu negara (dalam hal ini ekspor kopi yang dilakukan daerah Nusa Tenggara Timur ke negara Jepang) dimana salah satu variabelnya memiliki kesamaan yakni untuk variabel harga

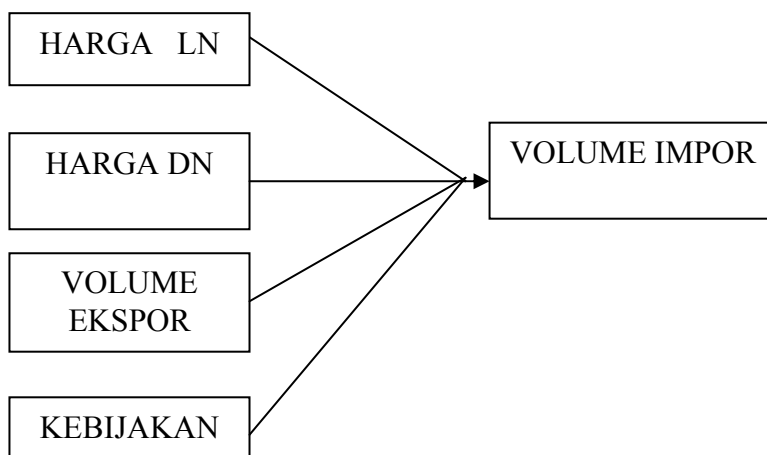
luar negeri yang dapat disamakan dengan harga kopi dunia (jenis arabica dan robusta) pada penelitian terdahulu.

2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis terutama didasarkan pada model analisis keseimbangan parsial, yang kemudian dikembangkan atas beberapa teori yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan teori yang ada perlu kiranya dilakukan pembahasan tentang analisis keseimbangan parsial, juga tingkat proteksi efektif dengan adanya pemberlakuan tarif impor.

Adapun kerangka pemikiran teoritisnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.3. Hipotesis

Hipotesis dalam suatu penelitian mutlak diperlukan adanya. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasilnya dapat dipakai sebagai masukan dalam menentukan kebijakan, khususnya dalam pemberian fasilitas

kemudahan ekspor tujuan ekspor (KITE) bagi pengusaha (yang dalam hal ini adalah pengusaha yang eksportir sekaligus importir dan produsen) industri garment dan tekstil di Jawa Tengah.

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah:

- a. Ada pengaruh negatif variabel harga bahan baku impor di luar negeri terhadap volume impor bahan baku.
- b. Ada pengaruh negatif variabel harga bahan baku impor di dalam negeri terhadap volume impor bahan baku.
- c. Ada pengaruh positif variabel volume ekspor terhadap volume impor bahan baku.
- d. Ada pengaruh positif variabel nilai fasilitas terhadap volume impor bahan baku.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional

Variabel-variabel yang akan dianalisis meliputi variabel yang dipilih dengan batasan :

- a) Volume Impor adalah total impor atas bahan baku yang mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) untuk periode waktu 1 tahun berupa bahan baku utama (kain untuk garment dan benang untuk tekstil), dalam satuan bahan (yards/meter).
- b) Volume ekspor adalah total ekspor untuk barang jadi yang diekspor, yang bahan bakunya mendapat fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) untuk periode 1 tahun (pakaian jadi untuk garment dan kain untuk tekstil), dalam satuan barang (pcs).
- c) Harga luar negeri adalah harga bahan impor per satuan bahan (yards/meter) di luar negeri dan merupakan harga rata-rata, dalam \$ USD.
- d) Harga dalam negeri adalah harga bahan baku impor apabila dibeli di dalam negeri per satuan bahan (yards/meter) dan merupakan harga rata-rata, dalam rupiah.
- e) Nilai Fasilitas KITE adalah total fasilitas KITE yang diberikan untuk industri garment dan tekstil dalam kurun waktu 1 tahun, dalam rupiah.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

- a. Data Realisasi Impor bagi industri garment dan tekstil di Jawa Tengah yang memperoleh fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) untuk tahun 2004 - 2006.
- b. Data Realisasi ekspor bagi industri garment dan tekstil di Jawa Tengah yang memperoleh fasilitas KITE untuk tahun 2004 - 2006.
- c. Data Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang diterima oleh pengusaha industri garment dan tekstil di Jawa Tengah untuk tahun 2004 – 2006.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Panel Data (*Pooled Data*), yang merupakan gabungan dari dua jenis data, yaitu (Gujarati.1995):

- a. Data *Time Series (Time Series Data)*, yaitu serangkaian data hasil pengamatan yang nilainya diambil berdasarkan perbedaan waktu, misalnya mingguan, bulanan, tahunan
- b. Data *Cross Section (Cross Sectional Data)*, merupakan data yang dikumpulkan yang terdiri dari 1 atau beberapa variabel pada saat yang bersamaan, misalnya data harga dan data produksi untuk sejumlah perusahaan tertentu dalam suatu waktu tertentu.

Sedangkan sumber data yang digunakan akan diperoleh dari

- a. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

- b Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah & DI Yogyakarta
- c. Departemen Perindustrian
- d. Departemen Perdagangan
- e. Lembaga/instansi terkait

3.3. Populasi

Data yang digunakan adalah data sekunder terhadap semua industri Garment dan Tekstil (populasi) yang menerima Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batasan sebagai berikut:

- Perusahaan yang memproduksi sejak tahun 2004 s/d 2006
- Perusahaan berdomisili di Jawa Tengah
- Sehingga populasi yang didapat sejumlah 16 perusahaan garment dan textile yang memenuhi kedua syarat tersebut

3.4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan berupa:

1. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan (buku-buku/literature) ,
2. Pengumpulan data berdasarkan Laporan instansi (DJBC) dan sumber lain yang relevan

3.5. Teknik Analisis

3.5.1. Analisis Regresi

Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antara variabel-variabel. Secara umum ada dua macam hubungan antara dua atau lebih variabel yaitu bentuk hubungan dan keeratan hubungan. Bentuk hubungan inilah yang digunakan dalam analisis regresi. Terapan regresi dalam berbagai bidang tersebut pada umumnya dikaitkan dengan studi ketergantungan suatu variabel (variabel tak bebas) pada variabel lainnya (variabel bebas).

Analisis Regresi berguna dalam menelaah hubungan dua variabel atau lebih dan terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna sehingga dalam penerapannya lebih bersifat eksploratif. Secara implisit ada dua pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Merupakan pencarian tempat kedudukan atau lokasi dari rata-rata variabel tertentu misal Y , untuk berbagai nilai dari variabel lain, misalnya X . Kumpulan titik-titik dari lokasi/ tempat kedudukan ini dapat dihubungkan oleh suatu garis atau kurva tertentu yang disebut garis regresi, yang dapat berupa fungsi linier, kuadratik, logaritma.
- b. Penyesuaian suatu fungsi/ kurva terhadap kumpulan data, terutama apabila data yang dimiliki tidak cukup banyak sehingga ada kesan bahwa rata-rata Y untuk setiap nilai X diperoleh dengan dasar yang tidak cukup kuat.

Adapun fungsi regresi dalam penelitian ini yang menggunakan hubungan satu variabel tak bebas dengan beberapa variabel bebas adalah:

$$Y = f(P, P^*, X, Z)$$

Dimana:

Y = variabel tak bebas

P, P*, X dan Z = variabel bebas

Jadi fungsi regresi disini untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel tak bebas Y dengan beberapa variabel bebas, baik secara bersama-sama maupun secara parsial (sendiri).

Dalam penelitian ini menggunakan populasi yang terdiri dari dua jenis data, adalah:

- b. Data *Cross section* yang terdiri dari perusahaan pengguna fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) untuk industri garment dan tekstil yang ada di Jawa Tengah, sejumlah 16 perusahaan.
- c. Data *Time series* yang terbagi atas 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006.

Keuntungan menggunakan Panel Data adalah (Gujarati. 2003):

1. Panel data berhubungan dengan individu, perusahaan, negara, dimana terdapat heterogenitas. Teknik estimasi panel data dapat menerangkan heterogenitas secara eksplisit dalam harga atas variabel spesifik individual dalam jangka pendek.
2. Dengan mengombinasikan pengamatan secara *time series* dan *cross section* maka panel data akan membuat data menjadi lebih informatif,

lebih bervariasi dan mengurangi adanya multikolinearitas antar variabel, derajat kebebasan yang lebih tinggi dan lebih efisien.

3. Berdasarkan panel data akan memudahkan untuk mengetahui adanya perubahan dinamik. Seperti misalnya masalah pengangguran, mobilitas tenaga kerja akan menjadi lebih mudah dipelajari melalui panel data.
4. Panel data dapat mendeteksi secara lebih baik dan mengukur pengaruh yang timbul, yang tidak dapat dilakukan oleh apabila hanya menggunakan data *time series* saja atau data *cross section* saja. Misalnya dalam mempelajari pengaruh tingkat upah minimum bagi tenaga kerja dan pendapatannya akan lebih baik apabila dipelajari dengan memasukkan tingkat upah minimum dalam suatu negara.
5. Dengan panel data dapat mengetahui perilaku model yang lebih bervariasi. Misalnya fenomena seperti skala ekonomis dan perubahan teknologi akan lebih baik menggunakan panel data daripada hanya menggunakan data *time series* atau data *cross section* saja.
6. Panel data dapat meminimalkan bias yang terjadi apabila menjumlahkan individu atau perusahaan.

Dalam penelitian ini menggunakan panel data yang diambil secara *time series* untuk 3 tahun (2004-2006) dan secara *cross section* diambil data untuk 16 perusahaan pada industri garment dan tekstil di Jawa Tengah). Data yang diperoleh sejumlah 48 data (3 x 16), dimana volume impor (Y) akan tergantung pada variable X_2 (harga luar negeri), X_3 (harga

dalam negeri), X_4 (volume ekspor) dan X_5 (fasilitas KITE) yang secara umum dapat dirumuskan dalam fungsi:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \mu_{it}$$

Dimana i merupakan cross sectional unit ($i = 1, 2, \dots, 16$)

t rentang waktu-tahunan ($t = 1, 2, 3$)

Apabila data yang terdapat dalam data *cross section* di dalamnya terdapat jumlah data *time series* yang sama untuk masing-masing perusahaan maka panel data tersebut dikatakan sebagai *balanced panel*. Untuk contoh apabila atas 16 perusahaan tersebut, masing-masing memiliki data tahunan yang sama (3 data) maka jumlah data menjadi 48 data. Jadi data dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai *balanced panel*. Sedangkan apabila ada perbedaan jumlah data dalam data tahunan maka disebut *unbalanced panel*. Dengan asumsi bahwa variabel X nonstokastik dan bahwa variabel pengganggu yang mengikuti disebut E (μ_{it}). Untuk mengestimasi fungsi tersebut tergantung pada asumsi tentang intersep, slope dan error term.

Estimasi atas model regresi panel data yang digunakan pada penelitian ini mengambil asumsi bahwa slope-nya konstant sedangkan intersep-nya bervariasi atas waktu antar individu (perusahaan). Sehubungan dengan hal tersebut maka model regresi yang digunakan adalah *Least-Squares Dummy Variable (LSDV)*.

Model regresi LSDV adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Model tersebut di atas dikenal dengan *fixed effects model* (FEM) yang mengasumsikan bahwa slope tidak bervariasi baik antar individu (perusahaan) maupun antar waktu (tahunan), namun untuk intersep-nya berbeda antar individu (perusahaan).

Perbedaan intersep dapat menggunakan teknik dengan *dummy variable* untuk menjelaskan adanya perbedaan tersebut (*differential intercept dummies*), yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Dalam penelitian ini menggunakan model ekonometri:

$$Q_m = \alpha_0 + \alpha_1 P/P^* + \alpha_2 X + \alpha_3 Z + \varepsilon_t$$

Atas model tersebut kemudian ditransformasi dalam bentuk logaritma menjadi:

$$\text{Log } Q_m = \log \alpha_0 + \log \alpha_1 P - \log \alpha_1 P^* + \log \alpha_2 X + \log \alpha_3 Z$$

Dengan menggunakan variabel dummi untuk tahun 2005 dan 2006, maka dalam penelitian ini model tersebut menjadi:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 D_{2005} + \alpha_2 D_{2006} - \alpha_3 P_{it} - \alpha_4 P^*_{it} + \alpha_5 X_{it} + \alpha_6 Z_{it} + \mu_{it}$$

Dimana Y = Volume impor

P = Harga luar negeri

P* = Harga dalam negeri

X = Volume ekspor

Z = Fasilitas KITE

3.5.2. Uji Ekonometri

Menurut Gujarati.1978, model analisis dalam setiap penelitian secara teoritis akan menghasilkan nilai parameter penduga yang sah bila dipenuhi asumsi klasik (uji ekonometri) yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Tujuan uji ini untuk mengetahui apakah ada hubungan/korelasi antar variabel bebas, apabila tidak ada hubungan berarti model regresi tersebut dianggap benar/baik.

b. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi penting model regresi adanya homoskedastisitas, yaitu bahwa varians tiap unsur *disturbance* tergantung (*conditional*) pada nilai yang dipilih dari variabel yang menjelaskan, adalah suatu angka konstan yang sama dengan σ^2 . Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi tersebut terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika ditemukan pengamatan (variens) yang berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain berarti terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang dan tidak terdapat dalam distorbansi atau gangguan. Jadi unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun. Tujuan uji untuk mengetahui apakah ada korelasi unsur gangguan pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1).

Disamping uji asumsi klasik, harus dilakukan juga uji statistik untuk mengetahui ada tidaknya/ besar kecilnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel tak bebas, yaitu:

a. Uji-t (Uji signifikansi individual)

Digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel tak bebas (independen) dengan satu variabel bebas. Uji dilakukan untuk masing-masing satu variabel bebas, dengan hipotesis nol (H_0) adalah apakah satu parameter sama dengan nol.

$$H_0 : \alpha_1 = 0$$

Artinya variabel independen tersebut bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependennya. Sedangkan Hipotesis alternatifnya (Hi) tidak sama dengan nol.

$$H_i : \alpha_1 \neq 0$$

Berarti variabel independen tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian:

- Jika nilai t hitung < t tabel maka Ho diterima
- Jika nilai t hitung > t tabel maka Ho ditolak

b. Uji-F (Uji signifikansi simultan)

Digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis nol (Ho) adalah apakah semua parameter sama dengan nol.

$$H_0 : \alpha_1 = \dots = \alpha_6 = 0$$

Artinya variabel independen secara simultan bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan Hipotesis alternatifnya (Hi) secara simultan semua parameter tidak sama dengan nol.

$$H_i : \alpha_1 \neq \dots \neq \alpha_6 \neq 0$$

Berarti semua variabel secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian:

- Jika nilai F hitung $< F$ tabel maka H_0 diterima
- Jika nilai F hitung $> F$ tabel maka H_0 ditolak

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengukur kebaikan-suai (*goodness of fit*) dari persamaan regresi, yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh variabel yang menjelaskan (tunggal) X .

Besarnya nilai R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$, berarti apabila R^2 bernilai nol atau mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependennya amat terbatas (tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan) dan sebaliknya apabila nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependennya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)

Kebijakan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Jelasnya bahwa fasilitas ini bertujuan untuk:

- a) Mendorong kegiatan ekspor sehingga akan meningkatkan aliran devisa yang masuk ke dalam negeri, dengan cara memberikan kemudahan terhadap importasi bahan baku/penolong yang digunakan dalam proses produksi barang jadi untuk tujuan ekspor
- b) Meningkatkan ekspor non migas dengan penyederhanaan tatacara pemberian fasilitas
- c) Penggunaan produksi barang hasil olahan dari perusahaan yang mendapat fasilitas sebagai penunjang meningkatkan perekonomian di dalam negeri .

4.1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

4.1.2. Peraturan Pelaksanaan

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 36/PMK.04/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 14/BC/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-25/BC/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

- f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-11/BC/2006 tanggal 08 Agustus 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

4.1.3. Jenis Fasilitas

Dalam fasilitas kemudahan impor (KITE) terbagi dalam 2 jenis fasilitas, yaitu:

1. Fasilitas Pembebasan

Yaitu pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat

2. Fasilitas Pengembalian

Yaitu pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat

Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Berikat seperti tersebut di atas, adalah suatu bangunan, tempat atau suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas

barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan asal dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah fasilitas KITE untuk jenis fasilitas Pembebasan Bahan Baku saja, dan untuk selanjutnya dalam pembahasan disebut dengan fasilitas.

4.1.4. Persyaratan Pokok Fasilitas

Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan fasilitas KITE, harus memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah tempat pengajuan permohonan fasilitas KITE.

Sedangkan prosedur Penerbitan NIPER (Nomor Induk Perusahaan) adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus mengajukan Data Induk Perusahaan (DIPER) secara lengkap dan benar, disertai data pelengkap pengajuan NIPER, yaitu:
 - 1) Fotocopi Akte Notaris pendirian perusahaan beserta Perubahannya yang terakhir
 - 2) Fotocopi NPWP dan Penetapan PKP
 - 3) Fotocopi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
 - 4) Fotocopi SIUI (Surat Ijin Usaha Industri) untuk perusahaan PMDN atau SIUT (Surat Ijin Usaha Tetap) untuk perusahaan PMA
 - 5) Fotocopi Ijin Prinsip dari BPM untuk perusahaan PMA/PMDN

- 6) Fotocopi identitas Direksi dan Komisaris (KTP/Paspor/Kitas) yang masih berlaku
 - 7) Bukti Kepemilikan kantor/pabrik (Sertifikat Kepemilikan Tanah) beserta Ijin HO (gangguan), IMB dan Surat Keterangan Domisili)
 - 8) Struktur Organisasi perusahaan
 - 9) Surat Pemberitahuan Registrasi Impor (SPR)
 - 10) Uraian Proses Produksi atas barang yang diproduksi
 - 11) Laporan Keuangan Tahunan (tahun terakhir)
 - 12) Denah lokasi pabrik dan Layout pabrik
 - 13) Dokumentasi berupa foto pabrik/kantor/mesin/gudang
- b. Berdasarkan pengajuan DIPER, dilakukan penelitian administratif dan lapangan terhadap kebenaran data perusahaan
 - c. Peninjauan lapangan dilaksanakan paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal penerimaan DIPER dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kesimpulan Hasil Survey
 - d. Dalam hal lokasi perusahaan berada diluar wilayah pengawasan Kantor Wilayah yang bersangkutan, peninjauan dapat didelegasikan ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi perusahaan tersebut
 - e. Penelitian kebenaran data dalam DIPER dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Kesimpulan Hasil Survey
 - f. Keputusan:
 - 1) Penerbitan NIPER dalam hal memenuhi persyaratan, atau

2) Penolakan dalam hal tidak memenuhi persyaratan

Apabila NIPER telah disetujui, maka perusahaan berkewajiban memasang papan nama di lokasi perusahaan dengan mencantumkan NIPER-nya. Selain itu harus memberitahukan secara tertulis apabila ada perubahan data yang terdapat dalam DIPER paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan terjadi.

Atas NIPER yang telah dimiliki perusahaan dapat dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah, apabila:

a. Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor barang dan/atau bahan untuk memproduksi barang ekspor dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut terhitung sejak:

1) NIPER diterbitkan

2) Tanggal realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat terakhir

b. Perusahaan tidak memberitahukan adanya perubahan data pada DIPER dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya perubahan

c. Atas permintaan perusahaan yang bersangkutan, setelah dilakukan audit fasilitas KITE yang telah diperolehnya.

Setelah pencabutan NIPER, apabila masih ada sisa fasilitas (BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM) yang terutang serta sanksi, wajib dilunasi selambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal pencabutan NIPER.

4.1.5. Prosedur Pemberian Fasilitas Pembebasan

Setiap perusahaan (eksportir/importir produsen) yang telah memiliki NIPER, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan. Adapun prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, dengan dilampiri:
 - 1) Formulir BCF.KT01 yang berisi rencana impor dan ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan datang
 - 2) Rincian kebutuhan barang dan/ atau bahan baku impor
 - 3) Hasil Produksi selama 12 bulan yang lalu (realisasi ekspor)
 - 4) Fotocopi NPWP/PKP
 - 5) Fotocopi NIPER
 - 6) Uraian proses produksi
 - 7) Kontrak ekspor/ Purchase Order
 - 8) Daftar Pemakaian Bahan Baku (daftar konversi)
- b. Dilakukan proses pemeriksaan dan penelitian permohonan perusahaan dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
- c. Keputusan:
 - 1) Disetujui, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembebasan Bea masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, atau

2) Ditolak, dengan menerbitkan Surat Penolakan

4.1.6. Prosedur Pengeluaran Barang

Setelah perusahaan memperoleh fasilitas pembebasan dalam bentuk Surat Keputusan yang berisi bahan baku atau bahan penolong yang mendapat fasilitas pembebasan yang dapat diimpor, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Perusahaan menyerahkan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) beserta Jaminan sebesar nilai BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang tertera dalam PIB
- b. Jaminan diserahkan ke Kantor Wilayah (KITE)
- c. Atas penyerahan jaminan tersebut diterbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ)
- d. STTJ dan SK Fasilitas serta PIB digunakan untuk mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean

Yang dimaksud dengan Jaminan, dapat berupa:

- a. Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Devisa
- b. Customs Bond atau Surety Bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- c. Surat Sanggup Bayar diterbitkan oleh perusahaan sendiri dan hanya berlaku terhadap perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah

Jangka waktu jaminan adalah 6 (enam) bulan dan harus diperpanjang oleh perusahaan dalam hal masa berlaku jaminan sudah berakhir sedangkan barang impor belum seluruhnya dipertanggungjawabkan realisasi ekspornya. Perpanjangan jaminan harus dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku jaminan.

Jaminan dapat dikembalikan setelah perusahaan menyelesaikan seluruh kewajibannya (menyerahkan laporan atas ekspor yang telah dilaksanakan).

4.1.7. Kewajiban Perusahaan Fasilitas KITE

Setelah perusahaan menerima fasilitas KITE maka ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Melakukan proses produksi atas bahan baku impor yang mendapat fasilitas KITE
- b. Melakukan kegiatan ekspor barang dengan mempergunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- c. Ekspor barang harus terlaksana dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan

- d. Terhadap PEB yang mendapat fasilitas KITE (yang barangnya telah diekspor) Kantor Pabean menerbitkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
- e. Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor ke Kantor Wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- f. Penyerahan Laporan Ekspor (LE) dengan mempergunakan formulir Laporan Penggunaan Barang dan/atau bahan asal impor yang mendapat Pembebasan BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut (BCL.KT01), yang dilampiri:
 - a. Fotocopi PIB
 - b. Fotocopi SPPB
 - c. LHP asli
 - d. Fotocopi STTJ
 - e. Fotocopi PEB yang telah disahkan
 - f. Fotocopi B/L (Bill of Lading) atau AWB (Airway Bill)
- g. Dalam hal Laporan Ekspor disetujui, maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ), yang menunjukkan jumlah BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang sudah selesai dipertanggungjawabkan dan/atau yang masih harus dijaminan oleh perusahaan.
- h. Apabila terhadap BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang sudah selesai dipertanggungjawabkan, maka jaminan yang pernah

diserahkan akan dikembalikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPJ diterbitkan.

- i. Apabila terhadap BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang masih harus dijamin, perusahaan dapat mengganti jaminan yang pernah disampaikan minimal sebesar nilai jaminan yang ditetapkan dalam SPPJ.

4.2. Fasilitas KITE di Jawa Tengah

Fasilitas KITE yang digunakan perusahaan di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 104 perusahaan sampai akhir tahun 2006.

Berbagai komoditas yang mendapat fasilitas KITE di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, meliputi;

| | |
|--|---------------|
| 1) Industri Furniture/mebel dan barang dari kayu | 28 perusahaan |
| 2) Industri Garment dan tekstil | 24 perusahaan |
| 3) Industri Plastik dan barang dari plastik | 15 perusahaan |
| 4) Industri Kulit dan barang dari kulit | 13 perusahaan |
| 5) Industri Human hair/ barang dari rambut | 5 perusahaan |
| 6) Industri Makanan dan minuman | 3 perusahaan |
| 7) Industri Kertas | 2 perusahaan |
| 8) Industri Kaca | 2 perusahaan |
| 9) Industri Tas | 2 perusahaan |
| 10) Industri Sepeda motor | 1 perusahaan |

| | |
|--|--------------|
| 11) Industri Keramik | 1 perusahaan |
| 12) Industri Kapal | 1 perusahaan |
| 13) Industri Perhiasan imitasi | 1 perusahaan |
| 14) Industri Mesin | 1 perusahaan |
| 15) Industri Ban | 1 perusahaan |
| 16) Industri Barang dari logam | 1 perusahaan |
| 17) Industri Bola tennis | 1 perusahaan |
| 18) Industri Besi | 1 perusahaan |
| 19) Industri Alat pelinting rokok manual | 1 perusahaan |

Dari 104 perusahaan pengguna fasilitas KITE yang masih aktif, industri furniture paling banyak memanfaatkan fasilitas pemerintah tersebut. Diikuti industri garment dan tekstil serta industri plastik dan barang dari plastik. Sejak tahun 2004 fasilitas KITE ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah dalam bentuk Tim Kerja Pelayanan Fasilitas KITE.

Dalam aktivitas pelayanan Fasilitas KITE, dilakukan dengan menerapkan program aplikasi komputer yang sudah tersedia, sehingga semua data yang masuk akan tersimpan secara otomatis dalam file operasional komputer fasilitas KITE. Pelayanan fasilitas KITE. Sistem aplikasi yang telah dilaksanakan tersebut sangat membantu kelancaran keluar masuknya barang dari dan ke negara tujuan karena dengan otomasi dapat memberikan waktu pelayanan yang lebih cepat dan akurat, namun ketelitian dan kecermatan petugas dan pejabat pelayanan KITE juga

diperlukan dalam memberikan setiap keputusan yang akan berdampak pada kerugian negara apabila memberikan keputusan yang tidak tepat.

Tahap pertama yang dilakukan dalam pemberian fasilitas KITE adalah dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan yang akan menggunakan fasilitas KITE. Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui eksistensi perusahaan dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor selama perusahaan tersebut beroperasi sehingga pemberian fasilitas tidak salah sasaran. Pada tahap ini akan diterbitkan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) apabila perusahaan tersebut dinilai layak mendapatkan fasilitas KITE.

Sejumlah 32 perusahaan merupakan perusahaan yang baru bergabung dengan fasilitas KITE sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, sedangkan 72 perusahaan lainnya sudah bergabung sejak masih dalam pengawasan Bapeksta Keuangan (sampai akhir tahun 2003). Hal tersebut dapat dibedakan apabila dilihat dari format Nomor Induk Perusahaan (NIPER). Jumlah 104 perusahaan pengguna fasilitas KITE menunjukkan bahwa ada 104 perusahaan yang sampai saat ini dinyatakan aktif menggunakan fasilitas KITE. Sedangkan untuk perusahaan yang masuk kategori tidak aktif (tidak menggunakan fasilitas KITE selama 12 bulan berturut-turut), NIPER dicabut dan untuk menggunakan kembali fasilitas KITE maka perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan sebagaimana perusahaan baru (mendapatkan NIPER baru dan bukan mengaktifkan NIPER lama).

Tahap berikutnya, perusahaan yang telah memiliki NIPER akan melakukan aktivasi program aplikasi komputer sebelum mengajukan permohonan fasilitas KITE (dalam hal ini adalah Fasilitas Pembebasan Bahan Baku Impor). Perusahaan membuat Rencana bahan baku impor yang diperlukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan produksi, yang dapat dibuktikan dengan adanya Kontrak Ekspor atau Realisasi ekspor 12 bulan yang lalu. Namun dimungkinkan apabila dalam tahun berjalan ternyata bahan baku yang dibutuhkan lebih banyak dari yang tercantum dalam SK Pembebasan, maka perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk bahan baku tersebut.

Jadi dalam kurun waktu satu tahun perusahaan dapat diberikan lebih dari 1 SK pembebasan bahan baku impor dengan alasan antara lain:

- a) Bahan baku yang akan diimpor berbeda dengan yang terdapat dalam SK sebelumnya untuk barang produksi yang sama,
- b) Bahan baku yang akan diimpor telah habis digunakan (telah direalisasikan) dengan menggunakan SK sebelumnya,
- c) Adanya pesanan (order) baru dengan bahan baku yang berbeda dengan bahan baku yang digunakan sebelumnya.

Atas importasi yang telah dilakukan dengan menggunakan SK Pembebasan bahan baku (dengan dokumen impor/ PIB), pengusaha wajib menyerahkan jaminan sebesar nilai Bea masuk dan PPN yang dibebaskan, sebelum barang dikeluarkan dari pelabuhan. Terhadap jaminan yang diserahkan tersebut, dapat dikembalikan setelah pengusaha/perusahaan

melakukan proses produksi dengan menggunakan bahan baku impor tersebut dan barang hasil produksinya kemudian diekspor. Setelah barang diekspor (dengan dokumen ekspor yaitu PEB/Pemberitahuan Ekspor Barang dan LHP/Laporan Hasil Pemeriksaan) maka pengusaha wajib melaporkan realisasi tersebut dengan tujuan menarik kembali jaminan yang telah diserahkan.

Jaminan dapat dikembalikan setelah seluruh barang impor yang menggunakan fasilitas dilaporkan ekspornya. Apabila ekspornya dilaporkan sebagian-sebagian, maka jaminan tidak dapat langsung dikembalikan, namun secara bertahap dengan penurunan jaminan. Apabila sampai akhir periode impor (umur dokumen impor adalah 12 bulan sejak impor dilakukan) tidak dilakukan realisasi ekspornya, maka atas jaminan yang telah diserahkan dapat dilakukan pencairan jaminan dengan dendanya dan yang bertanggung jawab adalah dari pihak penjamin (Bank atau Perusahaan Asuransi). Apabila atas impor bahan baku tidak seluruhnya direalisasikan ekspornya, maka atas sisa bahan bakunya setelah jatuh tempo impornya harus dibayar sejumlah Bea Masuk dan PPN yang seharusnya dibayar, dan masih ditambah denda.

Perusahaan pengguna fasilitas KITE dapat di-nonaktifkan sementara (diblokir) apabila yang bersangkutan tidak segera memenuhi kewajibannya, antara lain, ada dokumen impor (PIB) yang telah jatuh tempo namun tidak segera dilakukan perpanjangan, ada dokumen impor (PIB) yang telah

dicairkan namun belum dipenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pencairan tersebut.

Apabila perusahaan melakukan kewajibannya secara rutin maka hal seperti tersebut di atas tidak perlu terjadi.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Regresi

Untuk menganalisis apakah pengaruh/dampak dengan adanya perubahan harga, pengaruh ekspor, pengaruh pemberian fasilitas kemudahan impor terhadap volume impor untuk industri garment dan tekstil di Jawa Tengah, digunakan model regresi dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 D_{2005} + \alpha_2 D_{2006} - \alpha_3 P_{it} - \alpha_4 P^*_{it} + \alpha_5 X_{it} + \alpha_6 Z_{it} + \mu_{it}$$

Dimana

- Y = Volume impor
- P = Harga luar negeri
- P* = Harga dalam negeri
- X = Volume ekspor
- Z = Fasilitas KITE

Hasil estimasi dari model di atas dengan bantuan software Eviews, ditunjukkan pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Rangkuman Hasil Estimasi

| | |
|--|---|
| | Variabel Dependen : Volume Impor (Y) |
|--|---|

| Variabel Independen | Koeff.Regresi | Nilai t Ratio | Prob. Sig |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Harga Luar Negeri (LnX1) | -0,0115 | -0,0213 | 0,9831 |
| Harga dalam Negeri (LnX2) | -0,1613 | -0,3604 | 0,7203 |
| Volume Ekspor (LnX3) | 0,4315 | 4,3191** | 0,0001 |
| Fasilitas (LnX4) | 0,6192 | 3,6758** | 0,0007 |
| D1 | -0,1919 | -0,3623 | 0,7190 |
| D2 | -0,1858 | -0,3515 | 0,7270 |
| Konstanta | -3,4998 | -0,7057 | 0,4844 |
| F | 8,8184 | | |
| Prob. Sig. | 0,000** | | |
| R ² | 0,4995 | | |
| N | 48 | | |
| Elastisitas Returns to Scale | 1,089 | | |

Keterangan :

** : Nyata pada derajat kepercayaan 99% ($\alpha = 0,01$)

* : Nyata pada derajat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)

Berdasarkan hasil regresi pada tabel tersebut di atas maka kondisi pemberian fasilitas kemudahan impor untuk industri garment dan tekstil di Jawa Tengah apabila diformulasikan dalam model adalah sebagai berikut:

$$\text{LnY} = 3,4998 - 0,0115\text{LnX}_1 - 0,1613\text{LnX}_2 + 0,4315\text{LnX}_3 + 0,6192\text{LnX}_4 - 0,1919\text{D}_1 - 0,1858\text{D}_2$$

5.1.1 Uji-F

Dari Tabel 5.1. di atas menunjukkan bahwa secara bersama-sama/simultan (uji-F) semua variabel bebas yang terdiri harga luar negeri, harga dalam negeri, volume ekspor dan nilai fasilitas serta variabel dummy tahun 2005 dan 2006 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel volume impor industri garment dan tekstil pada tingkat kepercayaan sampai dengan $\alpha = 1\%$. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi F sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,01 ($\alpha = 1\%$).

5.1.2 Uji-t

Dari tabel dapat diketahui bahwa secara parsial (individu variabel bebas) maka;

- 1) Variabel volume ekspor memberikan nilai koefisien yang positif dan signifikan yaitu sebesar 0,4315 dengan nilai ratio 0,0001 yang memberikan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%).
- 2) Variabel fasilitas juga memberikan pengaruh yang signifikan dan nilai koefisien yang positif, yaitu sebesar 0,6192 dengan nilai ratio 0,0007 yang memberikan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata 5%).
- 3) Variabel harga dalam negeri tidak signifikan dan nilai koefisien yang negatif yaitu sebesar -0,1613
- 4) Variabel harga luar negeri juga memberikan pengaruh yang tidak signifikan dan nilai koefisien negatif sebesar -0,012

5.1.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis Pertama (H_1) menyatakan ada pengaruh negatif variabel harga luar negeri terhadap variabel volume impor. Nilai t-hitung variabel harga luar negeri mempunyai probabilitas signifikansi 0,9831 (lebih besar dari 0,05) yang berarti H_0 diterima dan menolak H_1 . Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel harga luar negeri (P) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume impor industri garment dan tekstil yang mendapat fasilitas kemudahan impor. Dengan demikian hipotesis (H_1)

yang menyatakan ada pengaruh negatif variabel harga luar negeri terhadap volume impor adalah ditolak.

Hipotesis kedua (H_2) ada pengaruh negatif variabel harga dalam negeri terhadap variabel volume impor. Nilai t-hitung variabel harga dalam negeri memberikan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,7203 (lebih besar dari 0,05) yang berarti H_0 diterima dan menolak H_2 . Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel harga dalam negeri (P^*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume impor industri garment dan tekstil yang mendapat fasilitas kemudahan impor. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa ada pengaruh negatif variabel harga dalam negeri terhadap volume impor adalah ditolak.

Hipotesis ketiga (H_3) ada pengaruh positif variabel volume ekspor terhadap variabel volume impor. Nilai t-hitung variabel volume ekspor memberikan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,0001 jauh di bawah 0,05 (taraf nyata 5%) yang berarti H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_3). Hal ini menunjukkan bahwa variabel volume ekspor (X) berpengaruh secara signifikan terhadap volume impor industri garment dan tekstil yang mendapat fasilitas kemudahan impor. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan ada pengaruh positif variabel volume ekspor terhadap volume impor adalah diterima.

Hipotesis keempat (H_4) ada pengaruh positif variabel nilai fasilitas terhadap volume impor. Nilai t-hitung variabel fasilitas memberikan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,0007 jauh di bawah 0,05 (taraf nyata

5%) yang berarti H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_4). Hal ini menunjukkan bahwa variabel fasilitas (Z) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap volume impor industri garment dan tekstil yang mendapat fasilitas kemudahan impor. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan ada pengaruh positif variabel nilai fasilitas terhadap volume impor adalah diterima.

5.1.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel tidak bebas. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel tidak bebas amat terbatas. Dan sebaliknya apabila nilai R^2 besar yaitu mendekati satu, maka variabel-variabel bebas mempunyai kemampuan menjelaskan variabel tidak bebas secara luas (Gujarati, 2003).

Dari tabel estimasi diketahui bahwa R^2 adjusted sebesar 0,4995 artinya variasi variabel tak bebas (volume impor) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya (harga dalam negeri, harga luar negeri, volume ekspor dan fasilitas) sebesar 49,95% sedangkan sisanya sebesar 50,05% dijelaskan faktor-faktor lainnya di luar model.

5.2. Pengujian Asumsi Klasik

Secara teoritis dalam setiap penelitian, model analisis akan menghasilkan parameter yang sah (estimasi yang BLUE/ *Best Linier Unbiased Estimator*) apabila dipenuhi asumsi klasik (uji ekonometri). Oleh karena itu sebelum melakukan interpretasi hasil penelitian maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas dan uji Autokorelasi.

5.2.1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel independen dalam model regresi. Pada kasus multikolinieritas yang serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen dalam model. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat korelasi antar variabel bebas (pada EViews)

Hasil perhitungan pengujian multikolinearitas dengan menggunakan EViews diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 5.2
Hasil Pengujian Multikolinearitas

| | LHASING | LHNEGERI | LEKSPOR | LFASILITAS | D1 | D2 |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| LHASING | 1.000000 | 0.744847 | -0.342966 | -0.051009 | -0.143643 | 0.047959 |
| LHNEGERI | 0.744847 | 1.000000 | -0.173072 | 0.145962 | 0.064467 | -0.096919 |
| LEKSPOR | -0.342966 | -0.173072 | 1.000000 | 0.301289 | 0.079421 | 0.154910 |
| LFASILITAS | -0.051009 | 0.145962 | 0.301289 | 1.000000 | 0.022898 | -0.017049 |
| D1 | -0.143643 | 0.064467 | 0.079421 | 0.022898 | 1.000000 | -0.500000 |
| D2 | 0.047959 | -0.096919 | 0.154910 | -0.017049 | -0.500000 | 1.000000 |

Sumber: Output hasil estimasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hubungan/ korelasi diantara variabel bebas tidak ada yang kuat atau nilai korelasinya tidak melebihi 0,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam data tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik Multikolinearitas.

5.2.1 Uji Heteroskedastisitas

Asumsi penting dari model regresi linear klasik adanya gangguan (*Disturbance/ Standar Error*) yang muncul dalam fungsi regresi adalah homoskedastisitas, yaitu bahwa semua standar error mempunyai varian yang sama. Pengujian adanya gejala Heteroskedastisitas dalam hal ini menggunakan uji White yaitu bahwa apabila pengujian secara statistik dari hasil regresi tidak signifikan, berarti model regresi ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Eviews didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.3
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

| | | | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| F-statistic | 1.524690 | Probability | 0.169635 |
| Obs*R-squared | 14.00755 | Probability | 0.172647 |

Sumber: Output hasil estimasi

Dari tabel menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan pada model dalam penelitian ini tidak mengandung penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas.

5.2.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan/korelasi antar anggota-anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (Gujarati, 2003). Konsekuensi adanya autokorelasi adalah selang keyakinan menjadi lebar serta variasi dan standar error ditaksir terlalu rendah, akibat selanjutnya adalah bahwa pengujian dengan menggunakan uji t dan F tidak lagi sah, jika diterapkan akan memberikan kesimpulan yang menyesatkan secara serius mengenai arti statistik dari

koefisien regresi yang ditaksir. Namun dalam penelitian ini menggunakan *Fix effect model* (FEM) maka pengujian autokorelasi dapat diabaikan (Nachrowi dan Usman, 2006).

5.3 Pembahasan

5.3.1 Model Regresi

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa estimasi regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai R^2 adjusted sebesar 0,4995 dan nilai F-hitung sebesar 8,8185 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel harga luar negeri, variabel harga dalam negeri, variabel volume ekspor dan variabel nilai fasilitas yang diberikan secara bersama-sama terhadap volume impor industri garment dan tekstil yang mendapat fasilitas kemudahan impor di Jawa Tengah,.

Berdasarkan tabel pula dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa variabel harga luar negeri tidak signifikan dan memberikan nilai koefisien regresi yang negatif sebesar -0,0115. Mengingat model dalam bentuk logaritma maka nilai koefisien regresi merupakan nilai elastisitas. Nilai koefisien regresi yang negatif merupakan nilai elastisitas yaitu sebesar -0,0115 yang menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan harga luar negeri sebesar 1% akan menurunkan volume

impor industri garment dan tekstil sebesar 0,0115 % apabila faktor-faktor lainnya konstan.

- b. Bahwa variabel harga dalam negeri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume impor industri garment dan tekstil dengan nilai elastisitas sebesar -0,1613. Seperti juga pada variabel harga luar negeri, variabel harga dalam negeri juga memiliki koefisien regresi yang bertanda negatif.. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan harga dalam negeri sebesar 1% maka volume impor industri garment dan tekstil akan mengalami penurunan sebesar 0,1613 % apabila faktor-faktor lainnya dianggap konstan.
- c. Bahwa variabel volume ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume impor industri garment dan tekstil. Nilai koefisien regresi yang merupakan nilai elastisitas sebesar 0,4315 menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan volume ekspor sebesar 1% maka akan meningkatkan volume impor industri garment dan tekstil sebesar 0,4315% apabila faktor-faktor lainnya konstan.
- d. Bahwa variabel fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume impor industri garment dan tekstil. Nilai koefisien regresi yang merupakan nilai elastisitas sebesar 0,6192 menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan pemberian fasilitas sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan volume impor industri garment dan tekstil sebesar 0,6192 % apabila faktor-faktor lainnya konstan.

- e. Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien yang paling besar adalah variabel fasilitas sebesar 0,6192 diikuti volume ekspor 0,4315. Variabel harga dalam negeri -0,1613 dan harga luar negeri -0,0115. Hal ini menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh terhadap volume impor industri garment dan tekstil adalah variabel fasilitas.

5.3.2. Fasilitas KITE

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau yang kemudian disebut sebagai KITE adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Jadi pemberian fasilitas KITE terdiri dari fasilitas Pembebasan dan fasilitas Pengembalian.

Fasilitas pembebasan adalah pembebasan Bea masuk (BM) dan/atau Cukai atas impor barang untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat. Sedangkan fasilitas Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke kawasan Berikat.

Dengan adanya fasilitas KITE ini, maka pengusaha garment dan tekstil akan berusaha meningkatkan volume impornya mengingat fasilitas KITE ini memberikan pembebasan pembayaran Bea masuk dan penangguhan PPN dan sebagai ganti pembayaran ini pengusaha wajib menjaminkan pungutan negara tersebut dalam bentuk Jaminan Bank/ Customs Bond/ Surat sanggup Bayar ke Bea Cukai. Tujuannya agar pengusaha benar-benar merealisasikan impornya untuk kegiatan produksi yang hasilnya akan diekspor. Jadi dampak pemberian fasilitas ini akan berpengaruh positif terhadap volume impor.

Adanya peningkatan volume impor yang diakibatkan adanya pemberian fasilitas KITE menyebabkan keluarnya aliran rupiah ke luar negeri. Namun apabila kemudian pengusaha melakukan kegiatan ekspor maka aliran dana akan masuk kembali ke dalam negeri dengan nilai yang lebih besar dari nilai yang keluar pada saat melakukan

impor. Hal tersebut dapat terjadi karena pengusaha berorientasi profit sehingga tidak mungkin mereka mau merugi. Jadi dengan kata lain dampak pemberian fasilitas KITE menyebabkan aliran dana yang masuk ke dalam negeri akan membuat surplus Neraca Perdagangan.

Salah satu penyebab mengapa para pengusaha mau mendatangkan bahan baku dari luar negeri adalah karena harga barang tersebut di dalam negeri lebih mahal dari harga bahan di luar negeri, disamping faktor kualitas bahan juga berpengaruh dalam hal ini. Jadi benar apabila dalam penelitian ini faktor harga dalam negeri tidak signifikan dan negatif. Demikian juga dengan faktor harga luar negeri, ternyata juga memberikan pengaruh yang negatif dan sekaligus tidak signifikan. Dalam hal ini variabel harga (harga dalam negeri dan harga luar negeri) ternyata berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap volume impor bahan baku.

Berkaitan dengan pemberian fasilitas KITE tersebut, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pemberian fasilitas KITE mempunyai pengaruh yang positif terhadap volume impor bahan baku industri garment dan tekstil di Jawa Tengah. Adanya kenaikan 1% nilai fasilitas akan mendorong kenaikan volume impor sebesar 0,6192%. Jadi pemberian fasilitas KITE ini memberikan dampak positif bagi peningkatan volume impor bahan baku pada industri garment dan tekstil.

Berdasarkan hasil penelitian maka pemberian fasilitas KITE dapat terus diberlakukan dengan harapan akan lebih meningkatkan volume impor yang akhirnya berdampak pada peningkatan volume ekspor. Peraturan-peraturan yang ada hendaknya dapat meminimalkan adanya celah pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Oleh karena itu agar eksistensi fasilitas KITE dapat dipertahankan/ditingkatkan maka perlu adanya pengawasan serta monitoring/evaluasi terhadap perusahaan pengguna fasilitas KITE. Secara periodik (setiap 12 bulan) dapat dilakukan evaluasi pemberian fasilitas KITE terhadap pengguna fasilitas, apakah untuk tahun berikutnya masih dapat diberikan fasilitas KITE atau tidak. Indikator yang dapat menjadi acuan adalah bagaimana realisasi SK pembebasan yang telah diterima, kemudian berapa besarnya realisasi eksponnya, untuk melihat apakah perusahaan tersebut masih layak untuk menerima fasilitas KITE pada tahun berikutnya.

Sedangkan pengawasan hendaknya dilakukan juga secara periodik agar meminimalkan adanya pelanggaran

yang dapat mengakibatkan negara dirugikan. Fenomena yang terjadi dalam dekade ini, seperti ditemukannya ekspor fiktif, kemudian semakin maraknya usaha penyelundupan, mengingatkan bahwa perlunya dilakukan pengawasan intensif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa regresi dan pembahasan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi volume impor industri garment dan tekstil dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel yang mempengaruhi volume impor secara signifikan dan positif adalah volume ekspor dan fasilitas KITE, sedangkan harga luar negeri dan harga dalam negeri memberikan pengaruh yang tidak signifikan dan nilai koefisien negatif. Hal ini berarti sudah sesuai dengan teori sehingga dapat dikatakan bahwa apabila harga luar negeri dan harga dalam negeri mengalami kenaikan maka volume impor sebagai penunjang industri garment dan tekstil akan menurun. Hal ini berarti bahwa peningkatan volume ekspor dan peningkatan fasilitas yang diberikan kepada importir akan meningkatkan volume impor sebagai penunjang industri garment dan tekstil.
2. Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien paling besar adalah variabel fasilitas sebesar 0,6192 diikuti variabel volume ekspor 0,4315 selanjutnya variabel harga dalam negeri 0,1613 dan harga luar negeri 0,0115. Hal ini berarti bahwa adanya kenaikan 1% fasilitas KITE akan menaikkan impor sebesar 0,6192% dan kenaikan 1% volume ekspor akan menaikkan volume impor sebesar 0,4315%.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Variabel fasilitas memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap volume impor industri garment dan tekstil di Jawa Tengah maka pemberian fasilitas kemudahan impor (KITE) dapat terus dilakukan dan dapat ditingkatkan dalam rangka meningkatkan perkembangan industri garment dan tekstil di Jawa Tengah. Pemberian fasilitas ini diharapkan mampu mendorong kegiatan ekspor-impor para pengusaha garment dan tekstil untuk dapat bersaing di pasar internasional. Karena dengan adanya fasilitas kemudahan impor (KITE) ini pengusaha akan membayar bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) dengan Rp 0,- apabila atas bahan baku impor yang mendapatkan fasilitas tersebut digunakan dalam proses produksi untuk tujuan ekspor.
2. Pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) ini dapat dinikmati oleh perusahaan pada berbagai komoditas yang berorientasi ekspor. Oleh karena itu hendaknya pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat memberikan sosialisasi tentang fasilitas KITE ini secara periodik kepada dunia usaha (pengusaha yang produsen eksportir dan importir).
3. Sebagai antisipasi akan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan pemberian fasilitas KITE ini, pemerintah hendaknya melakukan

evaluasi dan pengawasan secara periodik dan berkesinambungan terhadap perusahaan pengguna fasilitas agar tidak mengakibatkan kerugian negara.

4. Penelitian ini dapat menjadi awal dilakukannya penelitian serupa untuk produk/ komoditas yang berbeda sehingga dapat menjadi pembandingan, apakah pengaruh variabel fasilitas juga memberikan hasil yang sama (pengaruh yang signifikan dan positif).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. *Statistik Ekspor Jawa Tengah Tahun 2003-2005*

Badan Pusat Statistik. *Statistik Impor Jawa Tengah Tahun 2003-2005*

Boediono. 2001. *Ekonomi Makro*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE UGM

Cheng Hsiao. 1995. *Analysis of Panel Data*. New York: Cambridge University Press

Gujarati, Damodar. 1978. *Basic Econometrics*. Alih Bahasa Sumarno Zain. Jakarta: Penerbit Erlangga

Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. 4th Edition. McGraw-Hill, New York, USA

Hamdy Hady. 2001. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Buku 1 Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

Hendra Halwani. 2005. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Edisi Kedua. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Imam Ghozali. 2006. *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Edisi 1. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro

Lincoln Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Muana Nanga. 2001. *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Mudrajad Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Nachrowi, D.N, dan Usman, Hardius. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Perseveranda,ME. 2005. Analisis Permintaan Ekspor Kopi Daerah Nusa Tenggara Timur oleh Jepang. Tesis Universitas Diponegoro Semarang

Sadono Sukirno. 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bina Grafika

Salvatore, Dominick. 2004. *International Economics*. Eight Edition. John Wiley & Sons, Inc.

Salvatore, Dominick. 1997. *Ekonomi Internasional*. Edisi Kelima Jilid 1. Alih Bahasa Haris Munandar. Jakarta. Penerbit Erlangga

Samuelson, Paul A., and Nordhaus, William D. 1994. *Ekonomi*, Edisi ke-12 jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga

Soelistyo dan Nopirin. 1977. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Liberty

Tambunan, Tulus. 2001. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang: Kasus Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

Todaro, Michael P. 1997. *Economic Development*. Sixth Edition. NewYork.Longman

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31-12-2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 36/PMK.04/2005 tanggal 26-05-2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tanggal 31-12-2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 14/BC/2005 tanggal 29-07-2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-25/BC/2005 tanggal 16-12-2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-11/BC/2006 tanggal 08-08-2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

